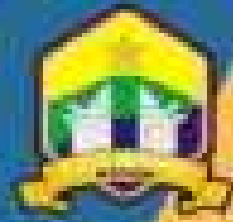


>> Pemerintah Kota Serang



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka memenuhi Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai mana diatur dalam dalam Peraturan Menteri aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, dijelaskan juga upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 yang berorientasi pada misi dan visi pemerintah Kota Serang, keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023.

Serang, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMKIMAN  
KOTA SERANG

**NOFRIADY EKA PUTRA, ST. MM. MH.**

NIP. 19781123 200604 1 002

## DAFTAR ISI

.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	i
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
1.5. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah .....	3
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur .....	4
b. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	5
Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan jabatan .....	5
Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan ASN di lingkungan DPKP .....	6
c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah .....	6
BAB II .....	15
PERENCANAAN KINERJA .....	15
2.1 Rencana Strategis DPKP 2018 - 2023 .....	15
Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2018 - 2023 ..	16
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 .....	34
Tabel 2.2 Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 .....	35
2.3 Indikator Kerja Utama .....	41
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Serang .....	41
2.4 Perjanjian Kinerja DPKP Tahun 2023 .....	42
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang .....	43
2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja DPKP Tahun 2023 .....	45
Tabel 2.5 Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	45
BAB III .....	50
AKUNTABILITAS KINERJA .....	50

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	50
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	51
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	54
3.1.1 Persentase Kawasan Kumuh .....	55
Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2023 .....	55
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2018 – 2023.....	56
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2023 .....	59
3.1.2 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata.....	60
Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2023.....	61
Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2018 – 2023 .....	63
3.1.3 Rasio Rumah Layak Huni .....	64
Tabel 3.8 Rincian Penyaluran Bantuan Sosial bagi RTLH berdasarkan Sumber Dananya .....	65
Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2023 .....	65
Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 – 2023 .....	66
3.1.4 Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah .....	67
Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah .....	67
<b>Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2023 .....</b>	<b>70</b>
Tabel 3.13 Data Perumahan yang Sudah Menyerahkan Aset PSU nya .....	70
3.1.5 Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan.....	80
Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2023	80
Tabel 3.15Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2018 – 2023 .....	81
3.1.6 Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .....	82
Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Capaian Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.....	82
<b>3.1.7 Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah .....</b>	<b>82</b>
3.2 Realisasi Anggaran .....	85
Tabel 3.18 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	85
Tabel 3.19 Pencapaian Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Kinerja Tahun 2023.....	88

3.3 Penghargaan.....	91
Gambar 3.1 Penghargaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.....	91
Gambar 3.2 Piagam Penghargaan.....	92
3.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2022.....	93
Tabel 4.1 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat .....	93
BAB IV.....	95
PENUTUP.....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, bahwa setiap organisasi publik pada saat ini lebih terbuka dan memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara tertulis periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi publik harus menyusun dan memiliki suatu rencana strategis yang merupakan alat untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Rencana kinerja yang merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, serta laporan pertanggungjawaban kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang disusun ini merupakan uraian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal Tahun anggaran 2023. Kegiatan/program tahunan tersebut merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus dirinci kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan terfokus.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah :

- a) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah tercapai selama Tahun 2023.
- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal Organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang, untuk setiap celah kerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat merumuskan strategi dan pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang–Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelahaan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 28 tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
9. Peraturan Walikota Serang Nomor 980/Kep.298–Huk/2018 Tentang Penerimaan Bantuan Rumah Rumah Swadaya Berupa Uang;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang selama tahun 2023. Capaian kinerja tersebut

juga dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang selama tahun 2023. Selain itu, capaian kinerja tahun 2023 juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur;
  - b. Sumber Daya Organisasi;
  - c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

- 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 2.2. Rencana Kerja Tahunan
- 2.3. Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis
- 2.4. Perjanjian Kinerja
- 2.5. Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Daftar Penghargaan

**Bab IV Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2022**

**Bab V Penutup**

### 1.5 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang yang awalnya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Permukiman Kota Serang namun karena terdapat penambahan kewenangan terkait pertanahan dan pemindahan kewenangan terkait ruang terbuka hijau, sanitasi dan air minum ke Dinas PUPR maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**a. Tugas, Fungsi, dan Struktur**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi tiga orang Kepala Bidang dan seorang Sekretaris. Berikut susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD Rusunawa;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Jabatan Pelaksana.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijalankan oleh 30 orang ASN yang juga dibantu sebanyak 91 orang. Berikut rincian ASN di lingkungan DPKP Kota Serang dan berdasarkan pendidikannya.

Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan jabatan

NO.	PEGAWAI ASN	JUMLAH	SATUAN
1	Kepala Dinas	1	Orang
2	Sekretaris	1	Orang
3	Kepala Bidang	3	Orang
4	Kepala Sub Bagian	3	Orang
5	Sub Koordinator / Jabatan Fungsional	11	Orang
6	Kepala UPT Rusunawa	1	Orang
7	Pelaksana Golongan IV	0	Orang
8	Pelaksana Golongan III	9	Orang
9	Pelaksana Golongan II	6	Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>Orang</b>

Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan ASN di lingkungan DPKP

Ø Strata Dua (S2)	:	12	Orang
Ø Strata Satu (S1)	:	17	Orang
Ø Diploma Tiga (D3)	:	1	Orang
Ø SLTA	:	5	Orang
<b>JUMLAH</b>	:	<b>35</b>	<b>Orang</b>

Dinas Perkim Kota Serang memiliki peraturan yang berdasar kepada SK Kepala Dinas dengan nomor 800.1.12.8/9.3/Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 (Lampiran I). Aturan ini menjadi dasar dalam pemberian *reward* yang diharapkan dapat terus memacu dan memotivasi kinerja tiap-tiap pegawai, dan sekaligus mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Apabila terdapat pegawai yang melanggar aturan, maka akan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja (TPP) kepada pegawai tersebut, seperti yang tertera pada lampirkan V.

### c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

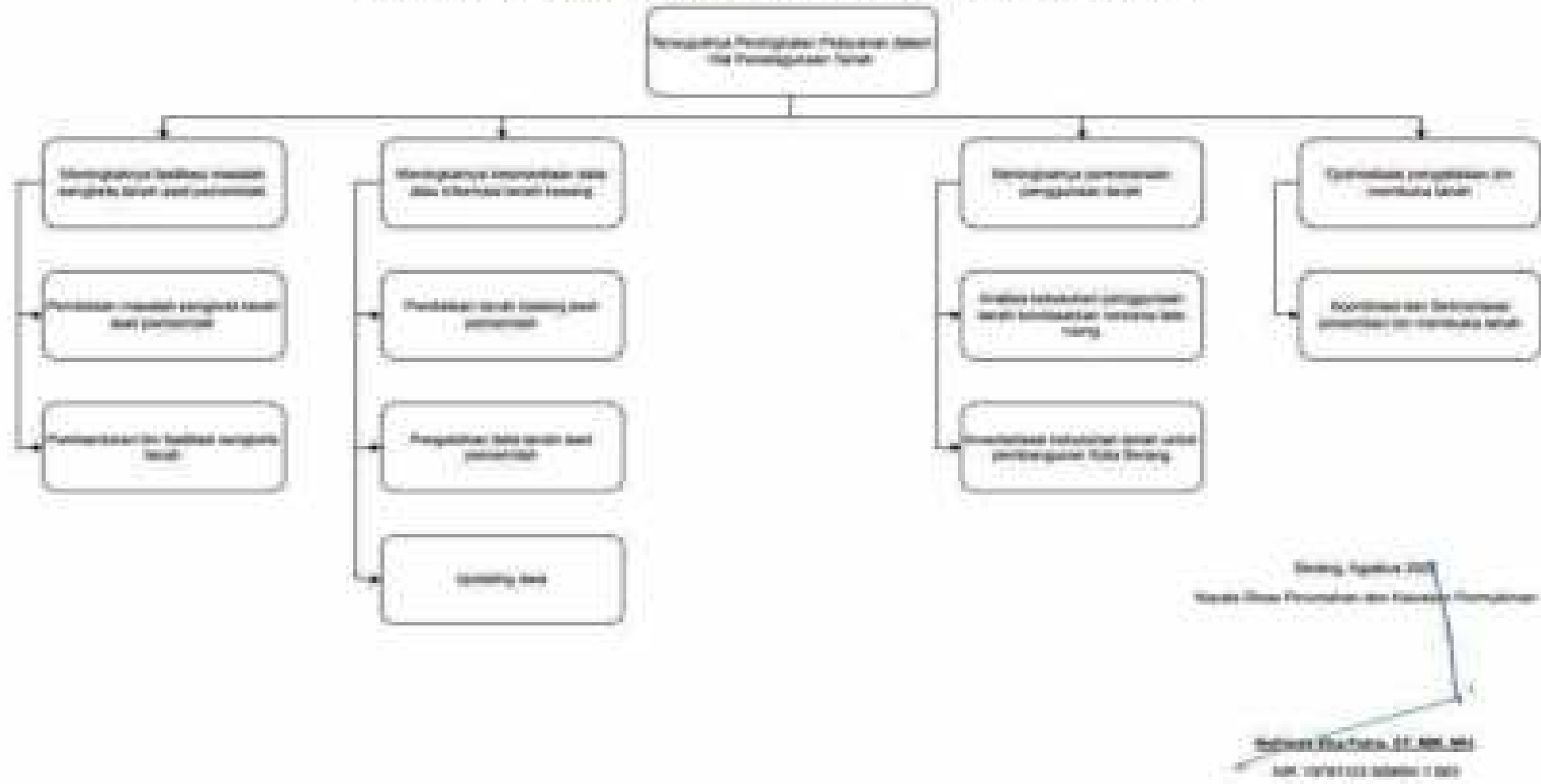
Berdasarkan tugas dan fungsi yang sebelumnya sudah dipaparkan, berikut isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPKP:

1. Optimalisasi Penyerahan PSU;
2. Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan;
3. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau;
4. Optimalisasi Pengembangan Satuan Lingkungan dan Prasarana Dasar Permukiman;
5. Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman pada Kawasan Kumuh;
6. Belum optimalnya urusan pertanahan.

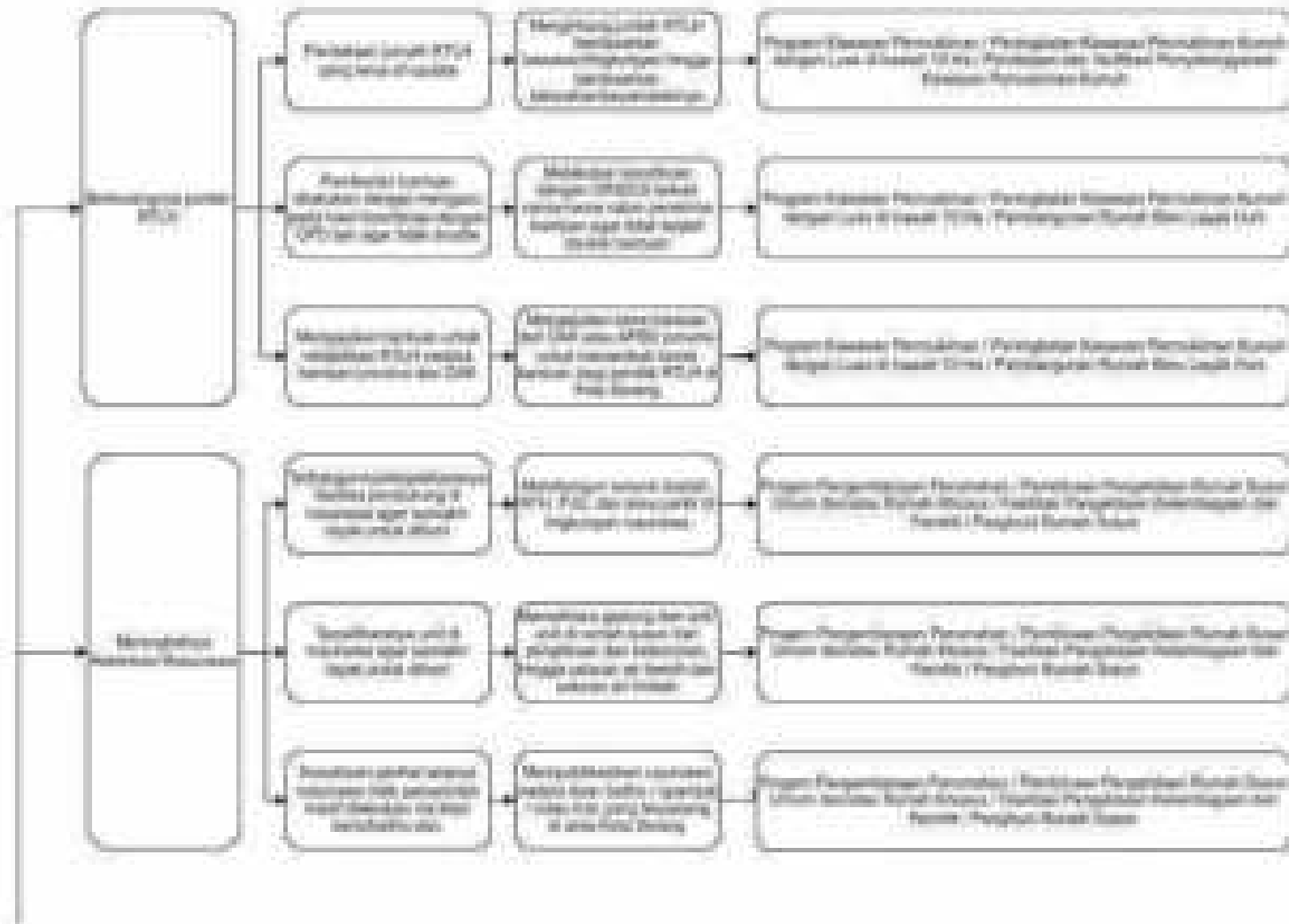
Berdasarkan keenam point di atas, Berikut pohon kinerja, *cross cutting*, dan *cascading* dari isu strategis dan permasalahan daerah di atas:

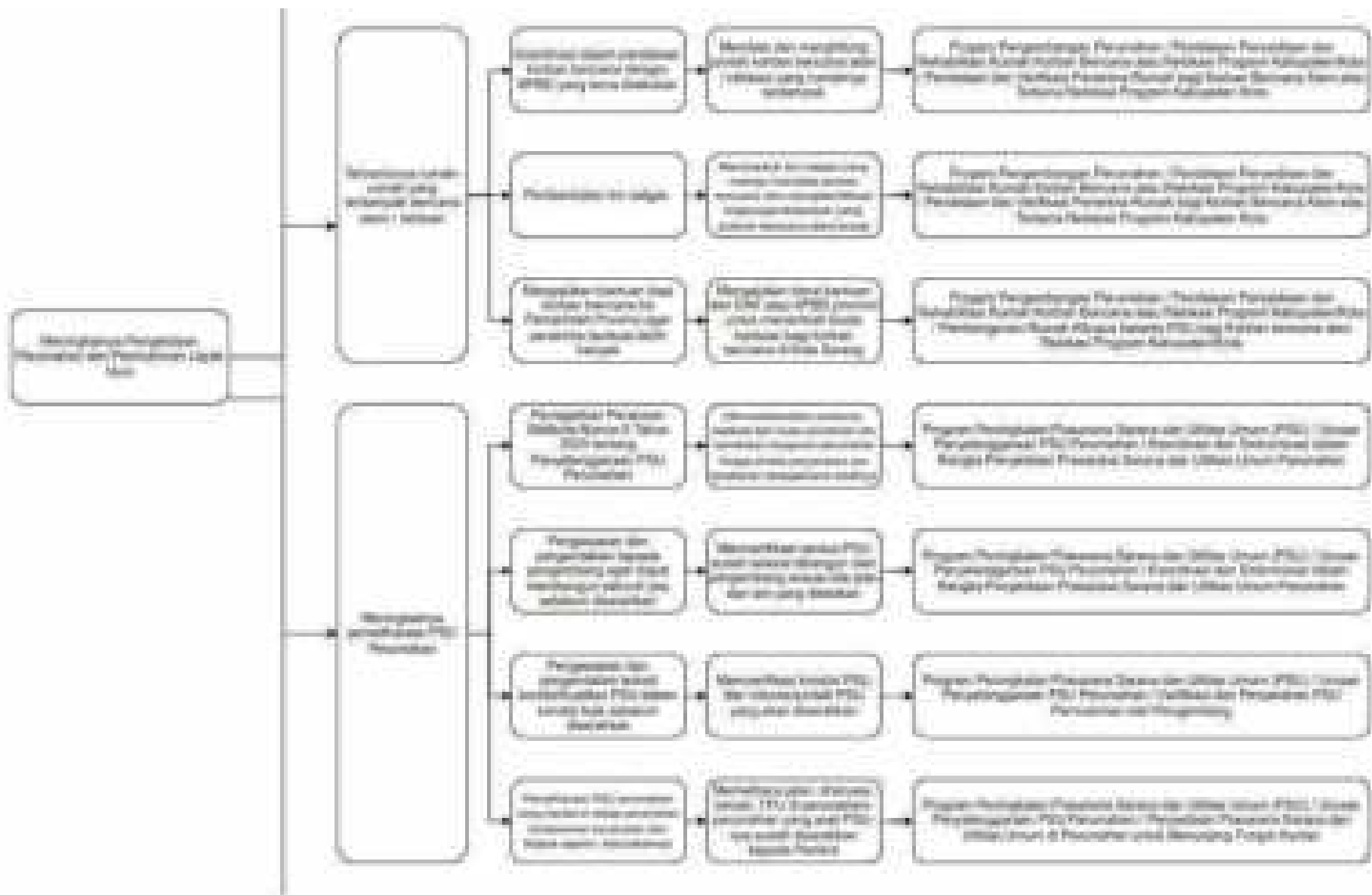


**POHON KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG**



**CASCADING URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG**

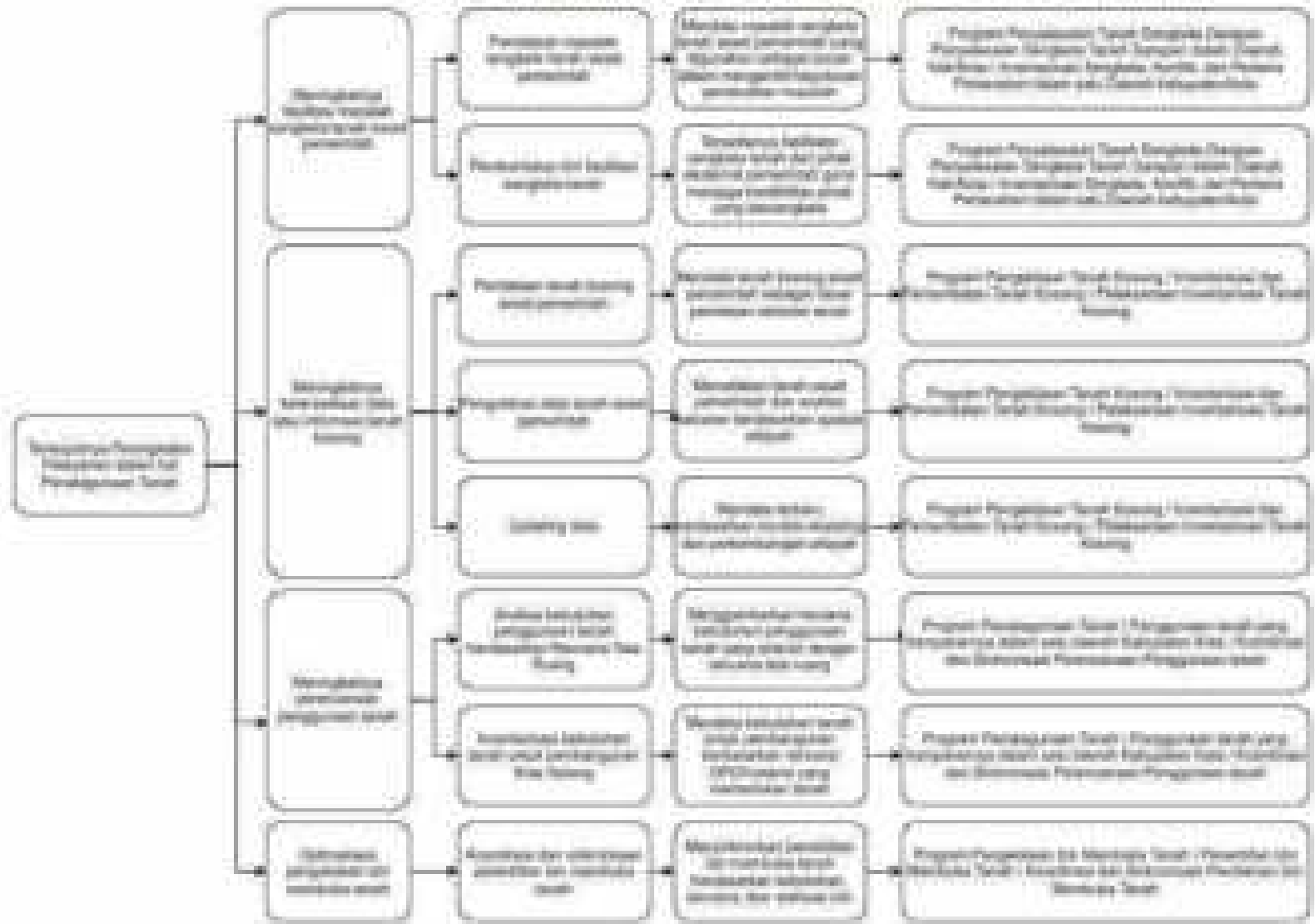








### CASCADING URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN



Serang, Agustus 2023  
 Kepala Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman  
 Kabupaten Serang  
 Subandi Sya Putra, ST, MM, MEd  
 NIP. 19701212 200804 1 000

REKAPITULASI LEMBAR KERJA/INDIKATOR PERJANJIAN DAN KAWASAN TANGGUNGJAWAB DAN LEMBAR PELAKSANAAN KAWASAN TANGGUNGJAWAB

INDIKATOR	2021	2022	2023	PERFORMANSI 2023
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pengembangan Kelembagaan	Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
	Pengembangan Sistem	Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
	Indikator Kinerja Utama	Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
	Indikator Kinerja Utama	Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)
		Meningkatkan jumlah organisasi mitra	Mengembangkan kemitraan dengan lembaga mitra (Kemitraan)	100% (100%) 100% (100%)

Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Sasaran
Kategori 1	Indikator 1.1	Indikator 1.1.1	Sasaran 1.1.1
	Indikator 1.2	Indikator 1.2.1	Sasaran 1.2.1
	Indikator 1.3	Indikator 1.3.1	Sasaran 1.3.1
	Indikator 1.4	Indikator 1.4.1	Sasaran 1.4.1
Kategori 2	Indikator 2.1	Indikator 2.1.1	Sasaran 2.1.1
	Indikator 2.2	Indikator 2.2.1	Sasaran 2.2.1
	Indikator 2.3	Indikator 2.3.1	Sasaran 2.3.1
Kategori 3	Indikator 3.1	Indikator 3.1.1	Sasaran 3.1.1
	Indikator 3.2	Indikator 3.2.1	Sasaran 3.2.1
Kategori 4	Indikator 4.1	Indikator 4.1.1	Sasaran 4.1.1
	Indikator 4.2	Indikator 4.2.1	Sasaran 4.2.1

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis DPKP 2018 - 2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang nomor 113 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang bahwa DPKP memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan. Berangkat dari hal tersebut, maka secara spesifik DPKP bertugas dalam pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Selain itu, DPKP juga melaksanakan pemberian bantuan baik untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana alam / relokasi, dan juga bantuan dalam bentuk PSU yakni jamban individu. Serta DPKP juga bertugas dalam bidang pertanahan yang meliputi pelaksanaan inventarisasi, perizinan, pemetaan tanah, dan juga penyelesaian sengketa tanah.

Secara singkat, rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang periode tahun 2018 – 2023:

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2018 - 2023

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR 2018	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2019		2020		2021		2023		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								44.139.881.449		29.724.589.369		43.725.694.652		50.115.048.000		52.857.225.351		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TERWUJUDNYA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERTATA			PERSENTASE KAWASAN KUMUH	%	2,02	1,44	44.139.881.449	1,34	29.724.589.369	0,768	43.725.694.652	1,15	50.115.048.000	1,07	52.857.225.351		
				PRESENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA	%	NA	98,87		99,19		96,57		99,38		99,45			
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI		RASIO RUMAH LAYAK HUNI	%	0,97	0,8670	0,8672		0,871		0,8679		0,868					
			CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	16,69	24,62	28,72		34,16		32,84		35,23					
	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN			CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		100,00		100,00	100
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH		CAPAIAN PENINGKATAN PENGUSAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	%	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		100,00		83,30	99,9

URUSAN KESEKRETARIATAN	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	%	100	100	6.120.165.740	100	7.134.340.117	100	6.533.602.117	100	7.613.287.000	100	8.627.851.351
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUNG PERANGKAT DAERAH		CAPAIAN HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%	100	100	6.120.165.740	100	7.134.340.117	100	6.533.602.117	100	7.613.287.000	100	8.627.851.351
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100	100	282.170.000	100	719.368.000	100	442.036.550	100	485.780.273	100	534.331.300
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perubahan, Renja Dan Renja Perubahan	Dokumen	3	3	149.850.000	3	157.522.286	3	101.190.550	3	110.885.714	3	121.947.285
		Jumlah Dokumen PK & IKU		Dokumen	1	1	1		1		1					
		Jumlah Kegiatan Forum OPD		Kegiatan	1	1	1		1		1					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	Dokumen	1	1	42.650.000	1	100.288.285,71	1	46.046.000	1	55.456.429	1	61.002.072
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1		1	55.983.285,71	1	43.323.000	1	48.233.214	1	53.056.535

				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen									1		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	Dokumen	1	1		1	55.983.285,71	1	19.620.000	1	22.905.714	1	25.196.285
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1		1	55.983.285,71	1	21.960.000	1	28.588.738	1	31.447.612
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monev Triwulan	Dokumen	2	2		2		2		2		2	128.112.285
				Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (LPPD, LKjIP, Ev Renja)	Dokumen	3	3	50.000.000	3	191.796.286	3	110.412.000	3	116.465.714	3	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan										2	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Profil Prangkat Daerah	Dokumen	0	0	39.670.000	1	101.811.285,71	1	99.485.000	1	103.244.750	1	113.569.225
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan										1	
			<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>3.326.577.703</b>	<b>13</b>	<b>3.131.502.272</b>	<b>13</b>	<b>4.079.425.490</b>	<b>13</b>	<b>4.815.207.000</b>	<b>13</b>	<b>5.256.090.351</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji ASN	Orang	24	24	3.077.733.703	24	3.047.369.472	24	3.877.505.490	25	4.613.287.000	25	5.033.978.351
				Jumlah Bulan Gaji ASN	Bulan	14	14		14	14			14			14
				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan											350

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Calk)	Dokumen	1	1	248.844.000	1	84.132.800	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	12	12		12		12	101.920.000	12	101.920.000	12	112.112.000
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan											12
			<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46.650.000</b>	<b>1</b>	<b>16.250.000</b>	<b>1</b>	<b>37.947.750</b>	<b>1</b>	<b>37.947.750</b>	<b>1</b>	<b>41.742.525</b>
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD	Dokumen	1	1	46.650.000	1	16.250.000	1	37.947.750	1	37.947.750	1	41.742.525
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan											1
			<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100</b>	<b>167.500.000</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	N/A	N/A	0	N/A	0	30		30	35.000.000	30	167.500.000
				Jumlah Stel Pakaian Batik & Olahraga	Stel	N/A	N/A	0	N/A	0	60		60		60	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket										1	
			<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>905.761.253</b>	<b>100</b>	<b>1.162.320.102</b>	<b>100</b>	<b>669.979.208</b>	<b>100</b>	<b>705.272.000</b>	<b>100</b>	<b>806.799.200</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	13.974.844	12	30.000.000	12	23.866.633



			Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										1	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	124.551.176	12	150.000.000	12	197.956.637
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket											12
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga	Unit	N/A	N/A	11.088.808	N/A	102.291.855	1659	35.788.336	1659	40.000.000	1660	22.833.860
				Jumlah Alat Kebersihan	Unit	N/A	N/A		N/A		1945		1945		1945	1945
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket											12
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100.000.000	12	65.000.000	12	51.200.000	12	55.000.000	12	60.800.000
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket											12
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	29.846.289	12	30.272.000	12	60.000.000
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket											12
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Surat Kabar	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	113.067.363	12	120.000.000	12	110.000.000
				Jumlah Tayang Promosi Publikasi	Tayang	12	12		12		12		12		12	12
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen											12
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12		12		12	29.995.500	12	30.000.000	12	30.000.000
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan											12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	12	12	282.500.000	12	356.088.887	12	271.555.700	12	250.000.000	12	238.159.200
				Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	12		12		12		12		12	12

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan										12		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen										12	63.182.870	
			<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>299.397.829</b>	<b>100</b>	<b>746.730.545</b>	<b>100</b>	<b>85.800.000</b>	<b>100</b>	<b>230.000.000</b>	<b>100</b>	<b>379.000.000</b>	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Roda Dua	Unit	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	35.000.000	
				Jumlah Unit Cator (Roda Tiga)	Unit	0	0		0		2					2	
				Jumlah Unit Crane	Unit	0	0		0		1					1	
				Jumlah Unit Dum Truck	Unit	0	0		0		1					1	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit											1	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur	Unit	40	45	110.888.085	45	460.313.349	45		45	50.000.000	45	55.000.000	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit										45		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang disewa	Gedung	0	0	0	0	-	1	80.000.000	1	80.000.000	1	50.000.000	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit											1	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kantor	Unit	20	25	188.509.744	25	286.417.195	28	5.800.000	28	100.000.000	30		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit										30	239.000.000	
			<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>789.515.455</b>	<b>100</b>	<b>841.374.199</b>	<b>100</b>	<b>702.474.019</b>	<b>100</b>	<b>766.000.000</b>	<b>100</b>	<b>855.600.000</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Lembar	N/A	12.804	128.043.111	15.973	159.734.840	900	9.000.000	1800	18.000.000	962	9.620.000	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan									12		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Telfon	Bulan	12	12	256.086.222	12	319.469.680	12	303.195.763	12	348.000.000	12	408.000.000
				Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	Bulan	0	0		0		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan										12	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Event Pawai/Pameran	Event	3	3	405.386.122	3	362.169.680	3	390.278.256	3	400.000.000	3	437.980.000
				Jumlah Orang OP 112, Rabeg & Sistem lainnya	orang	0	0		3		3					
				Jumlah Orang Keamanan	Orang	30	30		30		30					
				Jumlah Orang Jasa Cleaning Service/Office Boy	Orang	20	20		20		20					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan									12		
			<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>470.093.500</b>	<b>100</b>	<b>516.795.000</b>	<b>100</b>	<b>515.939.100</b>	<b>100</b>	<b>538.079.977</b>	<b>100</b>	<b>586.787.975</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Terpelihara	Unit	20	22	229.823.489	22	247.162.826	25	474.499.100	25	463.436.869	25	217.858.000
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit										5	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	28	28	240.270.011	30	269.632.174	30	41.440.000	45	74.643.108	25	-
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit										12	30.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit										30	56.000.000

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit										1	113.999.175
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										20	168.930.800
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>38.019.715.709</b>		<b>22.590.249.252</b>		<b>35.191.103.535</b>		<b>40.900.261.000</b>		<b>42.558.777.000</b>
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	-	-	-		75		62,50		72,92	3.200.000.000	
				PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	-	-	-	926.276.695	43,30	1.616.483.825	40,00	2.857.000.000	40		
			PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	0	0	0	43,3	30		30		30	1.250.000.000	
				PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	0	0	0	298.203.498	0	218.225.000	50	1.007.000.000	50		
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Alam	Unit	0	0	16.918.107	0	298.203.498	13	218.225.000	30	507.000.000	30	650.000.000
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah											
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Sosial	Unit	0	0	65.980.000	0	0	0	-	50	500.000.000	50	600.000.000
				Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/kota yang Terbangun	Unit Rumah											
			PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	0	0	13.447.491.909	0	628.073.198	10,71	1.398.258.825	100	1.850.000.000	100	1.950.000.000

				PRESENTASE TERSEDIAYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	0	0		0		100		100		100	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah RUSUNAWA yang dipelihara	Tower	0	1	5.715.743.800	1		1	835.600.653	1	1.200.000.000	3	1.250.000.000
		Pembangunan IPAL		Unit	0	0	0		0		0					
		Pembangunan Sarana Tempat Ibadah		Unit	0	0	0		0		1					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Laporan											1	
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Bulan Pengadaan ATK	Bulan	0	0	7.731.748.109	12	628.073.198	12	562.658.172	12	650.000.000	12	700.000.000
		Jumlah Penyediaan Alat Listrik		Bulan	0	0	12		12							
		Jumlah Materai		Lembar	0	0	500		4500		500		500			
		Jumlah Bulan Penyediaan Cetak dan Penggandaan		Bulan	0	0	12		12		12		12			
		Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi luar dalam		Bulan	0	0	12		12		12		12			
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kepada Calon Penghuni Rusun		orang	0	0	60		30		60		60			
		Jumlah Tenaga Kebersihan		Orang	N/A	N/A	N/A		N/A		120		180			
		Jumlah Tenaga Pelayanan RUSUNAWA		Orang	N/A	N/A	N/A		N/A		48		72			
		Jumlah Tenaga Keamanan		Orang	N/A	N/A	N/A		N/A		120		120			
		Jumlah Bulan Pengadaan Alat Kebersihan		Bulan	N/A	N/A	N/A		N/A		12		12			
		Jumlah Perabot Kantor		Unit	N/A	N/A	N/A		0							
		Jumlah Pekerja Harian Lepas		orang	N/A	N/A	N/A		0							
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Dokumen									96			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KAWASAN KUMUH	%	3,12	13,30	11.915.237.677	13,28	13.717.574.135	13,25	21.171.737.860	13,20	10.838.900.000	13,2	12.696.437.900
				PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	39,52	40,48		40,50		40,75		41,00		41,25	

				PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	67,63	67,70		67,90		70,10		70,30		70,5	
			<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH</b>	Dokumen	1	1	1.791.117.770	1	335.240.500	1	4.101.651.500	1	650.000.000	1	747.500.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penguatan BKM dan Fasilitator	BKM/Fasilitator	100	100	1.791.117.770	100	335.240.500,00	120	4.101.651.500	120	650.000.000	150	747.500.000
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi		NA	NA	NA	1		1							
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Laporan											1	
			<b>PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH</b>	%	0	100		100		100		100		100	11.948.937.900
				<b>PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH</b>	%	0	0	10.124.119.907	0	13.382.333.635	100	17.070.086.360	100	10.188.900.000	100	
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Kumuh	Dokumen	1	1	456.534.128	1	666.380.050	1	783.550.000	1	1.034.916.000	1	1.190.153.400
				Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen										6	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rehabilitasi RTLH	Unit	0	0	0	0	-	12	256.228.498	100	2.462.024.000	100	1.500.000.000
				Jumlah RTLH yang Mendapatkan Bantuan Stimulan (Peningkatan Kualitas) (DAK FISIK)	Unit	N/A	N/A		N/A		42		N/A			
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah										75	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah PSU RTLH yang ditangani	Unit	NA	NA	-	NA	-	0		900	2.034.320.000	900	4.000.000.000
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Baseline Kumuh	Dokumen	NA	NA		NA		0		6	225.030.000	1	258.784.500
				Jumlah Dokumen Pendataan RTLH	Dokumen	NA	NA		NA		0	1				

				Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen									0			
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Kawasan Kumuh	Kawasan	0	3	9.667.585.779	2	12.715.953.585	1	16.030.307.862	1	4.432.610.000	1	5.000.000.000	
				Pengadaan Tanah untuk Kawasan Kumuh	Kawasan	0	0		0		0						
				Jumlah Luasan Ha Kumuh yang ditangani	Ha	15.000	13300		N/A		1000		36,45		28,85		
				Jumlah RTLH yang Mendapatkan Bantuan Stimulan (Pembangunan Baru) (DAK FISIK)	Unit	NA	NA		NA		42		50		55		
				Jumlah Panjang Drainase Dan Tembok Penahan Tanah yang Tertangani di Lingkungan Permukiman													
				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang terbangun													
				Jumlah Panjang Jalan Setapak Pembangunan Paving Block													
				Jumlah Panjang Jalan yang Terpelihara di Lingkungan Permukiman													
				Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha											0	
				<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH</b>	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	10	12.061.361.000	12	10.303.562.100
			<b>PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PSU DI LUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN</b>	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	100	12.061.361.000	100	10.303.562.100	
				<b>PERSENTASE PENANGANAN RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH</b>	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-					
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman	Jumlah Pembangunan RTLH diluar Permukiman Kumuh (Pembangunan Baru)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA		60	1.532.550.000	30	1.000.000.000	
				Jumlah Rehabilitasi RTLH diluar Permukiman Kumuh (Peningkatan Kualitas)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			60		30

			kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah										100	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha	Jumlah PSU Permukiman Yang Terpelihara	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.528.811.000	50	9.303.562.100	50	
		Jumlah PSU Permukiman Yang Terbangun		Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10		10			
		Jumlah Sarana dan Prasarana TPU Permukiman (Pemagaran dll)		Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6		6			
		Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dipelihara		Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4		4			
		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Dokumen												
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN</b>	<b>%</b>	<b>19,49</b>	<b>24,62</b>	<b>12.574.088.016</b>	<b>28,72</b>	<b>7.946.398.422</b>	<b>34,16</b>	<b>12.402.881.850</b>	<b>32,84</b>	<b>15.143.000.000</b>	<b>35,23</b>	<b>16.358.777.000</b>
			<b>URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN</b>	<b>PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.574.088.016</b>	<b>100</b>	<b>7.946.398.422</b>	<b>100</b>	<b>12.402.881.850</b>	<b>100</b>	<b>15.143.000.000</b>	<b>100</b>	<b>16.358.777.000</b>
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Taman (PSU) Perumahan	Dokumen	0	4	1.880.526.202	0	585.995.696	3	837.584.000	3	1.237.350.000	4	1.353.127.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Beton Lingkungan Perumahan		Dokumen	N/A	N/A	1		1		1		2			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan		Dokumen	2	2	6		2		3		4			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Embung Perumahan		Lokasi	NA	NA	2		0		3		4			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan		Dokumen	2	2	3		2		2		4			



				Jumlah Dokumen Perencanaan Pemagaran Pemakaman	Dokumen	2	2		0		3		3		2	
				Dokumen PSU yang diserahkan	Dokumen	5	5		9		3		3		5	
				Jumlah Event Lingkungan Perumahan Sehat	Event	0	0		0		0		1		1	
				Jumlah Dokumen RP3KP	Dokumen	N/A	N/A		0		0		1		0	
				Jumlah Site Plan Perumahan yang di Keluarkan	Site plan	0	0		0		0		5		5	
				Dokumen PSU yang diserahkan	Dokumen						3					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen										18	
				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang terbangun	m2	N/A	N/A		13000	7.149.548.097	43600		61500		67000	
				Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara di Lingkungan Perumahan	m2	N/A	N/A		10000		22000		27600		32000	
				Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan di Lingkungan Perumahan	m2	N/A	N/A		3000		21600		33900		35000	
				Jumlah Lokasi Drainase Lingkungan Perumahan yang terbangun	Lokasi	N/A	N/A		5		1		5		5	
				Jumlah Lokasi Drainase yang dipelihara di Lingkungan Perumahan	Lokasi	N/A	N/A	10.172.607.654	23		48	11.371.400.040	54	13.705.650.000	48	14.705.650.000
				Jumlah Taman (PSU) Perumahan yang terbangun	Lokasi	N/A	N/A		2		0		3		3	
				Jumlah Taman (PSU) Perumahan yang dipelihara	Lokasi	N/A	N/A		47		56		62		67	
				Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dibangun	Lokasi	N/A	N/A		4		6		7		8	
				Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dipelihara	Lokasi	25	28		28		0		34		40	
				Jumlah Embung terbangun	Lokasi	2	2		0		0		0		1	

				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi									25		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Perumahan	Orang	50	50	520.954.159	50	210.854.629	50	193.897.810	100	200.000.000	100	
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan		Orang	100	100	50		100				100		100	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		Laporan											1	300.000.000
								-		-		1.835.519.000		1.601.500.000	1.670.597.000	
			<b>PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN</b>	<b>PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>0</b>	<b>48.675.000</b>	<b>100</b>	<b>181.500.000</b>	<b>100</b>	<b>216.199.000</b>
			<b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH LAPORAN SENGKETA, KONFLIK &amp; PERKARA YANG TERFASILITASI</b>	<b>Dokumen</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>0</b>	<b>48.675.000</b>	<b>2</b>	<b>181.500.000</b>	<b>2</b>	<b>216.199.000</b>
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi dan Investigasi	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	48.675.000	2	181.500.000	2	
		Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah		Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1	1					
		Sosialisasi Penanganan Masalah Pertanahan		Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	2	2					
		Jumlah data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen											1	216.199.000
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA		NA		0		2		2	
		Hasil fasilitasi sengketa, konflik		Dokumen	NA	NA		NA		0		2			2	
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Berita Acara												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>33,3</b>	<b>101.042.000</b>	<b>66,6</b>	<b>165.000.000</b>	<b>100</b>	<b>182.349.500</b>

			<b>INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>Dokumen</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>2</b>	<b>101.042.000</b>	<b>1</b>	<b>165.000.000</b>	<b>1</b>	<b>182.349.500</b>	
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Sosialisasi	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	90	101.042.000	3	165.000.000	3	182.349.500	
				Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2		4				
				Data Tanah Kosong Yang Belum Dimanfaatkan	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	1		4				
				Data Tanah Kosong Yang Sudah Dimanfaatkan	Unit/Software	NA	NA	NA	NA	NA	1						
				Jumlah Wilayah Yang Sudah Terinventarisir							2						
				Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Dokumen												3
			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA</b>	<b>%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>1.685.802.000</b>	<b>100</b>	<b>805.000.000</b>	<b>100</b>	<b>822.349.500</b>	
			<b>PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAPAIAN DOKUMENTASI PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dokumen</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>11</b>	<b>1.685.802.000</b>	<b>2</b>	<b>805.000.000</b>	<b>3</b>	<b>822.349.500</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0		2	200.000.000	3	208.674.750	
				Sosialisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0		250		3		
				Dokumen Kebijakan Perencanaan	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0		1		3		
				Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0		1		3		
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	laporan												3
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1	1.685.802.000	0	605.000.000	0	613.674.750	
				Dokumen Perundang-Undangan Pertanahan	Buku	NA	NA	NA	NA	NA	112		0				
				Penyusunan Kajian Konsolidasi Pertanahan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1		0				
				Lokasi Pembebasan Tanah	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	0		0				
				Dokumen Perencanaan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	0	0					

				Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan koordinasi konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen											
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN	%	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	100	450.000.000	100	449.699.000
			PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	1	450.000.000	3	449.699.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	0		4	200.000.000	4	182.349.500
				Sosialisasi Penetapan Lokasi/Izin Membuka Tanah Negara	Orang	NA	NA		NA		0		100		100	
				Jumlah dokumen izin membuka tanah dan penetapan lokasi	Dokumen	NA	NA		NA		0		1		3	
				Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuka tanah	Dokumen										1	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah Negara	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	0		4	250.000.000	6	267.349.500
				Monitoring Izin Membuka Tanah Negara/Penetapan Lokasi	Dokumen	NA	NA		NA		0		6		6	
				Dokumen Kebijakan Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	NA	NA		NA		0		1			
				Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen										1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	5.354.014.975	N/A	7.921.182.798			165.470.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	REALISASI RUANG TERBUKA HIJAU YANG TERPELIHARA	%	1,5	9,63	5.354.014.975	9,64	7.921.182.798			165.470.000			

			PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	LUASAN RTH YANG TERPELIHARA	Ha	158,9	158,9	5.354.014.975	N/A	7.921.182.798		165.470.000				
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Unit RTH yang Terbangun (BANPROV)	Unit			5.354.014.975		7.921.182.798		165.470.000				
				Jumlah Unit RTH yang Terbangun	Unit	0	1									
				Jumlah Unit RTH yang Terpelihara	Unit	33	35									
				JUMLAH DED RTH	Dokumen	2	0									
				Pengadaan Tanah untuk RTH	Unit											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								7.478.328.629		1.407.702.000						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH	%	37,52	38,95	4.488.354.120	56,14	577.059.700						
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN AIR BERSIH	%	100	100	4.488.354.120		577.059.700						
				JUMLAH KK YANG MENERIMA PENYALURAN AIR BERSIH	KK	50	85									
		8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Air Bersih	Dokumen	3	3	692.578.195	3	327.661.408						
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kran Umum Terbangun	Unit	3	2	3.795.775.925		249.398.292						
				Jumlah sumur Artesis yang Terbangun	Unit											
				Jumlah Jaringan Perpipaan Air Bersih	Unit		2									
				Perluasan SPAM Perpipaan (DAK FISIK)	Unit	0	2									
				Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan (DAK FISIK)	Unit	0	2									
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PRESENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	72,6	79,27	2.989.974.510	69,33	830.642.300						

			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI	%	100	100	2.989.974.510	100	830.642.300						
				JUMLAH KK YANG TERFASILITASI SANITASI DASAR	KK	0	100									
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Sanitasi Dasar	Dokumen	4	3	766.694.336		329.320.339						
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Jamban Individu terbangun	Unit			2.223.280.173		501.321.961						
		Jumlah IPAL Komunal terbangun		Unit												
		Jumlah MCK terbangun		Unit		2										
		Pembangunan IPAL Komunal (DAK FISIK)		Unit	0	4										
<b>TOTAL PENDANAAN OPD DINAS PERUMAHAN RAYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>44.139.881.449</b>		<b>29.724.589.369</b>		<b>43.725.694.652</b>		<b>50.115.048.000</b>		<b>52.857.225.351</b>

## 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Seluruh perencanaan yang tertuang pada dokumen rencana strategis di atas selanjutnya akan dijabarkan menjadi rencana tahunan yang biasa disebut dengan rencana kerja (Renja). Rencana kerja berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun berkenaan, pada dokumen rencana kerja pun tertuang rencana anggaran yang diperlukan yang berbanding lurus dengan target-target yang ditetapkan. Berikut rencana kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Tabel 2.2 Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran, Programn (outcome) dan kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023	
					K	Rp
1	2	4	5	6	9	
						53.029.816.534
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI	%	0,868	43.677.281.699,000
			CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	35,230	
	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	CAPAIAN PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFATAAN TANAH	%	99,900	871.590.000,000
		NON URUSAN	CAPAIAN HASIL EVALUASI LKjIP PERANGKAT DAERAH	%		8.480.944.835,000
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>INDEKS KEPUJASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>8.480.944.835,000</b>
		<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>346.981.000,000</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,000	117.593.000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,000	32.560.000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,000	40.887.000,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,000	23.797.750,000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,000	25.054.500,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,000	107.088.750,000



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-
		<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>13,000</b>	<b>5.189.398.664,000</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	37,000	4.956.287.695,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,000	157.650.969,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12,000	75.460.000,000
		<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1,000</b>	<b>41.188.800,000</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,000	41.188.800,000
		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>167.500.000,000</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,000	167.500.000,000
		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>713.330.596,000</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,000	19.863.907,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,000	177.526.073,000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,000	18.428.616,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,000	82.681.000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,000	55.000.000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12,000	110.000.000,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,000	30.000.000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,000	219.831.000,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		-
		<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>327.118.000,000</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,000	41.960.000,000

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21,000	235.158.000,000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,000	50.000.000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit		-
		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>876.263.600,000</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,000	8.000.000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,000	438.000.000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,000	430.263.600,000
		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>819.164.175,000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,000	217.858.000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20,000	332.455.000,000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	72,000	21.000.000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	126,000	49.820.000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,000	198.031.175,000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		-
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA</b>	<b>%</b>	<b>72,920</b>	<b>1.805.023.604,000</b>
			<b>PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA</b>	<b>%</b>	<b>40,000</b>	
		<b>PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM</b>	<b>%</b>	<b>30,000</b>	<b>236.375.000,000</b>
			<b>PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL</b>	<b>%</b>	<b>50,000</b>	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	18,000	236.375.000,000
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	-	-

		<b>PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAPAIAN HASIL PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>88.375.000,000</b>
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1,000	88.375.000,000
		<b>PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS</b>	<b>PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>1.480.273.604,000</b>
			<b>PRESENTASE TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	1,000	788.026.779,000
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	96,000	692.246.825,000
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI</b>	<b>%</b>	<b>13,200</b>	<b>19.559.340.531,000</b>
			<b>PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK</b>	<b>%</b>	<b>41,250</b>	
			<b>PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK</b>	<b>%</b>	<b>70,500</b>	
		<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1,000</b>	<b>17.170.000,000</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1,000	17.170.000,000
		<b>PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>19.542.170.531,000</b>
			<b>PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	18,000	1.501.536.150,000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	-	16.535.000,000
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	28,850	17.685.194.381,000
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1,000	338.905.000,000
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Dokumen		-
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	Unit		-
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH</b>	<b>%</b>	<b>12,000</b>	<b>20.305.000,000</b>

		<b>PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>20.305.000,000</b>
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	-	20.305.000,000
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen		
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN</b>	<b>%</b>	<b>35,230</b>	<b>22.292.612.564,000</b>
		<b>URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN</b>	<b>PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>22.292.612.564,000</b>
		Perencanaan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	48,000	2.373.470.000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1,000	64.570.000,000
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Laporan	20,000	125.051.000,000
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	25,000	19.729.521.564,000
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN</b>	<b>PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>59.085.000,000</b>
		<b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH DATA SENGKETA, KONFLIK &amp; PERKARA YANG TERFASILITASI</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1,000</b>	<b>59.085.000,000</b>
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah	Dokumen	1,000	59.085.000,000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>321.420.000,000</b>
		<b>INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2,000</b>	<b>321.420.000,000</b>
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	2,000	321.420.000,000
		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>355.055.000,000</b>

		<b>PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAPAIAN DOKUMENTASI PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Laporan</b>	<b>1,000</b>	<b>355.055.000,000</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1,000	355.055.000,000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN</b>	<b>%</b>	<b>100,000</b>	<b>136.030.000,000</b>
		<b>PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3,000</b>	<b>136.030.000,000</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1,000	19.170.000,000
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	1,000	116.860.000,000

Setelah penyusunan rencana kerja tahunan yang disadur dari dokumen rencana strategis lima tahunan, dalam suatu Tahun berjalan OPD akan mulai Menyusun rencana kinerja anggaran (RKA) yang berisi nilai-nilai belanja yang akan direalisasikan pada Tahun selanjutnya. Proses penyusunan rencana kinerja anggaran ini pun melalui beberapa proses asistensi untuk mengukur apakah nilai dari suatu belanja terlalu besar/kecil, sehingga tujuannya adalah untuk meminimalisir belanja yang dirasa berlebihan atau bukan prioritas.

## 2.3 Indikator Kerja Utama

Berikut Indikator Kerja Utama DPKP Tahun 2023:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Serang

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata	Persentase Kawasan Kumuh	%	1,07	<i>Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten/Kota / Luas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota * 100%</i>	Bidang Kawasan Permukiman
		Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,45	<i>Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah seluruh Rumah Tinggal</i>	Bidang Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,8680	<i>Jumlah Luasan Permukiman yang tertata / Jumlah Luas Permukiman * 100%</i>	Bidang Kawasan Permukiman
		Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	35,23	<i>Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %</i>	Bidang Perumahan
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan	Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100	<i>Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%</i>	Bidang Pertanahan
4	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah	Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	99,9	<i>Jumlah Realisasi Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah * 100%</i>	Bidang Pertanahan

Berdasarkan tabel 2.3 di atas diperoleh bahwa yang menjadi sasaran dalam setiap kinerja DPKP dari tahun ke tahun adalah menekan angka Kawasan kumuh, jumlah atau rasio rumah layak huni, jumlah perumahan yang menyerahkan aset PSU nya kepada pemerintah, dan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Semua sasaran tersebut tentunya ditunjang dengan semua program atau kegiatan yang dijalankan oleh DPKP setiap tahunnya. Sehingga diharapkan di tahun 2023 di mana pada tahun tersebut merupakan akhir periode Renstra DPKP hal-hal yang menjadi target DPKP akan tercapai.

#### **2.4 Perjanjian Kinerja DPKP Tahun 2023**

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (*budgeting process*). Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun target perjanjian kinerja/ penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata	Persentase Kawasan Kumuh	1,07
		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	99,45
	Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	Rasio Permukiman Layak Huni	0,8680
		Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	35,23%
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan	Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	100%
	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah	Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	99,90%
3	Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkung Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	60%

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100%	8.480.944.835	



2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa	72,92	1.805.023.604	
		Presentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana	40,00		
3	Program Kawasan Permukiman	Presentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	13,20%	19.559.340.531	
		Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik	41,25%		
		Presentase Panjang Drainasse Lingkungan Kondisi Baik	70,50%		
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH Di Luar Kawasan Kumuh	12,00%	20.305.000	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Psu Yang Diserahkan	35,23%	22.292.612.564	
6	Program Penatagunaan Tanah	Presentase Peningkatan Penggunaan Tanah Negara	100%	355.055.000	
7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Presentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	100%	321.420.000	

8	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Tanah Negara Yang Dimanfaatkan	100%	136.030.000	
9	Program Penyelesaian Tanah Sengketa Garapan	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah	100%	59.085.000	
Jumlah Total				53.029.816.534	

## 2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja DPKP Tahun 2023

Berikut rencana aksi DPKP Tahun 2023:

Tabel 2.5 Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Rencana Aksi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Rencana Pelaksanaan												Keterangan	
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Oct	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata				Persentase Kawasan Kumuh	%	1,07	43.677.281.699														
					Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%																
	Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni				Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,87															
						Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%		35,23													

		Terbantunya rumah-rumah yang terdampak bencana alam / sosial, dan Meningkatnya keterisian Rusunawa			Presentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana	%	40,00	1.805.023.604																	
			Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa			%	72,92																		
			Terbangunnya rumah-rumah yang terdampak bencana	Memberikan bantuan sosial barang pada rumah-rumah yang terdampak bencana	Presentase Rumah Yang Di Rehab Akibat Bencana Alam	%	30,00	236.375.000	√	√															
					Presentase Rumah Yang Di Rehab Akibat Bencana Sosial	%	50,00																		
			Terlaksananya pengelolaan Rusunawa dengan baik	Memelihara, mengelola, dan membangun sarana prasarana di lingkungan Rusunawa	Presentase Penghuni Rumah Susun Umum Dan Atau Rumah Khusus Yang Terbina	%	100,00	1.480.273.604	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
					Presentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kantor Rusunawa	%	100,00																		
			Terdatanya rumah-rumah korban bencana alam/relokasi	Mendata para korban bencana alam/relokasi yang rumahnya terdampak	Capaian Hasil Pendataan Dan Verifikasi Penerima Bantuan	%	100,00	88.375.000	√	√	√				√	√	√	√	√						
		Berkurangnya luasan kawasan kumuh, Berkurangnya RTLH di area Kawasan Kumuh, dan Meningkatnya pemeliharaan PSU Permukiman			Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik	%	41,25	19.559.340.531																	
			Presentase Panjang Drainase Lingkungan Kondisi Baik	%	70,50																				
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Kumuh	%	13,20																				
			Terlaksananya pengelolaan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Menyusun dokumen baseline Kumuh	Jumlah Dokumen Baseline Kawasan Kumuh	Dokumen	1,00	17.170.000	√	√	√														

			Terlaksananya peningkatan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Menyusun perencanaan pembangunan kawasan permukiman kumuh; membangun/memelihara PSU Permukiman Kumuh	Presentase Dokumen Perencanaan Kumuh	%	100,00	19.542.170.531	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Memberikan bantuan sosial untuk rehabilitasi RTLH	Presentase Unit Rehabilitasi Rtlh	%	100,00														
			<b>Berkurangnya jumlah RTLH di luar Kawasan Kumuh</b>		<b>Persentase RTLH di luar kawasan Kumuh</b>	<b>%</b>	<b>12,00</b>	<b>20.305.000</b>													
			Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Memberikan bantuan sosial untuk rehabilitasi RTLH	Persentase Penanganan RTLH di Luar Kawasan Kumuh	%	100,00	20.305.000	√												
			<b>Meningkatnya pemeliharaan PSU Perumahan</b>		<b>Presentase Psu Yang Diserahkan</b>	<b>%</b>	<b>35,23</b>	<b>22.292.612.564</b>													
			Terselenggaranya kegiatan peningkatan/pemeliharaan PSU Perumahan	Memberikan sosialisasi kepada para pengembang terkait pengelolaan PSU perumahan oleh Pemerintah Daerah; membangun/memelihara PSU perumahan	Presentase Psu Yang Terbangun	%	100,00	22.292.612.564	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan				Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100,00	871.590.000													
	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah				Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	99,90														

		<b>Meningkatnya fasilitasi masalah sengketa tanah aset pemerintah</b>			<b>Presentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>59.085.000</b>														
			Terlaksananya penyelesaian tanah sengketa garapan dalam daerah kabupaten/kota	Mengadakan rapat sosialisasi penanganan sengketa tanah, dan memfasilitasi penanganan sengketa tanah	Jumlah Data Sengketa, Konflik & Perkara Yang Terfasilitasi	Dokumen	1,00	59.085.000	√	√	√	√	√	√	√							
		<b>Meningkatnya ketersediaan data atau informasi tanah kosong</b>			<b>Presentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>321.420.000</b>														
			Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Melakukan koordinasi dgn stakeholder terkait dan updating pada aplikasi SIPP	Ketersediaan Data/Informasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Laporan	2,00	321.420.000	√	√												
		<b>Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah</b>			<b>Presentase Peningkatan Penggunaan Tanah Negara</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>355.055.000</b>														
			Tersedianya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/kota	Menyusun dokumen perencanaan penggunaan tanah	Capaian Dokumentasi Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	355.055.000	√	√	√	√										
		<b>Optimalisasi pengelolaan izin membuka tanah</b>			<b>Persentase Pengelolaan Tanah Negara Yang Dimanfaatkan</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>136.030.000</b>														
			Tersedianya dokumen izin membuka tanah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Membuka Tanah	Dokumen	3,00	136.030.000	√	√	√											

Rencana aksi pada table di atas bersifat acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada kenyataannya hal-hal yang dapat menyebabkan pekerjaan berjalan tidak sebagaimana mestinya bisa saja terjadi. Factor-faktor tersebut dapat berasal dari internal Dinas Perkim seperti persiapan kegiatan yang belum optimal sehingga kegaitan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana aksi, maupun factor eksternal seperti terkendalanya proses pencairan dana kegiatan dari BPKAD. Semua kegiatan yang

dilaksanakan sesuai rencana maupun yang terkendala dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui laporan pengukuran kinerja (Lampiran III) dan diinput melalui aplikasi SIMAK (Lampiran IV). Laporan tersebut berisi nilai anggaran yang diserap dari setiap kegiatan beserta outputnya, sehingga dapat diukur Tingkat ketercapaiannya dan persentase optimalisasinya.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selain itu, pengukuran kinerja juga merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target.

Kegiatan pengukuran kinerja tidak terlepas dari tahapan pengumpulan data kinerja. Pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Perkim diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor 640/9.4/1/DPKP/2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja (Lampiran II). Selanjutnya, kegiatan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama guna mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dalam kurun waktu Januari-Desember 2023. Proses tersebut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahap pengukuran kinerja ini tidak boleh menetapkan atau merubah indikator kinerja kegiatan dan satuan indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan didalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran, dilakukan pengumpulan data kinerja atau indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun. Dalam beberapa aspek pekerjaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bidang Kawasan permukiman seringkali bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam hal penataan dan peningkatan Kawasan kumuh, seperti Pemerintah Provinsi Banten baik dengan cara pengajuan bantuan Keuangan maupun permohonan agar Pemprov melakukan pembangunan langsung di wilayah kota Serang. Pihak lain yang sering berkoordinasi dengan DPKP adalah Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR melalui program KOTAKU. DPKP dan KOTAKU seringkali bersinergi dengan cara koordinasi, sosialisai maupun *sharing* data di lapangan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan diharapkan pembangunan dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Pada tabel 3.1 di bawah disajikan perbandingan antara apa yang sudah ditargetkan dan hasil capaian selama periode Tahun 2023.

Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata			Persentase Kawasan Kumuh	%	1,070	0,917	121,265	SANGAT TINGGI
				Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,450	97,013	97,55	SANGAT TINGGI
		Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,868	0,877	101,01	SANGAT TINGGI
				Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	35,230	43,049	122,20	SANGAT TINGGI
			Terbantunya rumah-rumah yang terdampak bencana alam / sosial	Persentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana	%	40,000	44,350	110,88	SANGAT TINGGI
			Meningkatnya Keterisian Rusunawa	Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa	%	72,920	54,167	74,28	SANGAT TINGGI
			Terbangunnya rumah-rumah yang terdampak bencana	Persentase Rumah Yang Di Rehab Akibat Bencana Alam	%	30,000	44,350	147,83	SANGAT TINGGI
				Persentase Rumah Yang Di Rehab Akibat Bencana Sosial	%	50,000		0,00	SANGAT RENDAH
			Terlaksananya pengelolaan Rusunawa dengan baik	Persentase Penghuni Rumah Susun Umum Dan Atau Rumah Khusus Yang Terbina	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
				Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kantor Rusunawa	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI



			Berkurangnya luasan kawasan kumuh / Meningkatnya pemeliharaan PSU Permukiman	Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik	%	41,250	42,950	104,12	SANGAT TINGGI
				Presentase Panjang Drainasse Lingkungan Kondisi Baik	%	70,500	29,936	42,46	SANGAT RENDAH
			Berkurangnya jumlah RTLH	Presentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	13,200	12,662	95,92	SANGAT TINGGI
			Terlaksananya pengelolaan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Baseline Kawasan Kumuh	Dokumen	1,000	1,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Terlaksananya peningkatan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Presentase Dokumen Perencanaan Kumuh	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
				Presentase Unit Rehabilitasi Rtlh	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Berkurangnya jumlah RTLH	Persentase Rtlh Di Luar Kawasan Kumuh	%	12,000	12,201	101,68	SANGAT TINGGI
			Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rtlh Diluar Kawasan Kumuh	%	100,000	0,000	0,00	SANGAT RENDAH
			Meningkatnya pemeliharaan PSU Perumahan	Presentase Psu Yang Diserahkan	%	35,230	43,049	122,20	SANGAT TINGGI
			Terselenggaranya kegiatan peningkatan/pemeliharaan PSU Perumahan	Presentase Psu Yang Terbangun	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan			Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI

		Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah		Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	99,900	99,900	100,00	SANGAT TINGGI
			Meningkatnya fasilitasi masalah sengketa tanah aset pemerintah	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Terlaksananya penyelesaian tanah sengketa garapan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik & Perkara Yang Terfasilitasi	Dokumen	1,000	1,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Meningkatnya ketersediaan data atau informasi tanah kosong	Presentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Ketersediaan Data/Informasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	2,000	2,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Presentase Peningkatan Penggunaan Tanah Negara	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Tersedianya perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/kota	Capaian Dokumentasi Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1,000	1,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Optimalisasi pengelolaan izin membuka tanah	Persentase Pengelolaan Tanah Negara Yang Dimanfaatkan	%	100,000	100,000	100,00	SANGAT TINGGI
			Tersedianya dokumen izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Membuka Tanah	Dokumen	3,000	3,000	100,00	SANGAT TINGGI

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki yakni urusan, yakni:

1. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
2. Urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman memiliki tujuan “Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tertata” yang memiliki dua indikator yakni:

1. Persentase Kawasan Kumuh;
2. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata.

Tujuan dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman di atas kemudian dijabarkan menjadi sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Layak Huni” yang memiliki dua indikator, yaitu:

1. Rasio Rumah Layak Huni;
2. Cakupan Perumahan Yang Ditangani Pemerintah Daerah.

Selanjutnya tujuan yang dijabarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, adalah “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan” dengan indikator “Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan”. Sasarannya adalah “Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah” dengan indikator “Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah”.

Pada sub bab ini akan dipaparkan mengenai capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digambarkan melalui capaian enam indikator di atas yang kemudian diklasifikasikan menjadi predikat kinerja pelayanan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 seperti di bawah ini:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

### 3.1.1 Persentase Kawasan Kumuh

Pada akhir Tahun 2022, SK Kawasan kumuh yang menjadi acuan kerja Dinas Perkim mengalami pembaharuan yang disahkan melalui Keputusan Walikota Serang Nomor 663/Kep.471-Huk/2022 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Serang. Luasan Kawasan kumuh pada Kepwal tersebut yakni sebesar 271 Ha yang tersebar di 86 titik (*Sumber: SK Kumuh; Bidang Kawasan Permukiman*). Selama Tahun 2023 Dinas Perkim sudah memugar seluas 26,34 Ha dari total luasan Kawasan permukiman seluas 5.973,96 Ha atau berarti hingga akhir Tahun 2023 luasan Kawasan permukiman kumuh adalah 0,917 % (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*) atau dapat dihitung dengan formula Berikut:

$$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten / Kota}}{\text{Luas Wilayah Daerah Kabupaten / Kota}} \times 100 \% = \frac{244,66 \text{ Ha}}{26670 \text{ Ha}} \times 100 \% = 0,917 \%$$

Sehingga menghasilkan seperti pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten/Kota / Luas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota * 100%	%	1,07	0,917	114,265	Sangat Tinggi

Indikator persentase kawasan kumuh ini merupakan variable yang mana semakin tinggi realisasinya semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin tinggi kinerjanya. Angka 0,917 % merupakan capaian yang sangat baik mengingat bahwa target di Tahun 2023 ini sebesar 1,07 %. Luasan kawasan kumuh mengalami peningkatan yang mulanya seluas 150 Ha di akhir tahun 2022, dan ternyata meluas menjadi 271 Ha setelah dilakukan pendataan ulang pada 7 indikator kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Meski tingkat kekumuhan di Kota Serang dikategorikan sebagai Kumuh Ringan, tidak lantas membuat Dinas Perkim menurunkan kinerja pelayanan pada sektor penanganan kawasan kumuh, hal ini dibuktikan pada tahun pertama pemberlakuan SK kumuh, Dinas Perkim sudah memugar seluas 26,34 Ha atau hampir 9,7 %. Capaian ini cukup baik mengingat tugas dan fungsi Dinas Perkim yang tidak hanya menangani kawasan kumuh, namun juga penyediaan PSU perumahan dan juga urusan pertanahan.

Persentase Kawasan kumuh ini merupakan salah satu indikator yang selama periode RPJMD 2018 – 2023 ini selalu mencapai target atau bahkan melebihi target. Hal ini karena DPKP selalu berfokus pada pembangunan PSU di Kawasan permukiman kumuh

khususnya pada aspek jalan lingkungan, drainase, dan RTLH. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJM	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					Dibandingkan dengan target akhir RPJM
			N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Persentase Kawasan Kumuh	%	1,070	2,010	2,000	1,200	1,150	1,070	2,010	2,000	0,768	0,564	0,917	100,000	100,000	136,000	150,920	114,265	114,265

Berdasarkan tabel di atas, pada tiga Tahun pertama dalam periode RPJMD 2018 – 2023, DPKP berhasil mencapai apa yang ditargetkan. Mulai Tahun 2021 hingga 2023 ini, DPKP justru dapat berhasil melebihi dari apa yang sudah ditargetkan. Pada Tahun 2021 tersebut, pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah memberi pengaruh pada optimalisasi dalam aspek perencanaan dan penganggaran sehingga hal tersebut memberi pengaruh dalam hal efisiensi dan optimalisasi kinerja. Di luar itu, faktor keberhasilan lainnya dalam mencapai tujuan pengentasan kawasan kumuh di Kota Serang yakni DPKP terus berkoordinasi dan mengusulkan pembangunan-pembangunan pada sector Kawasan permukiman kumuh pada Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan jalan lingkungan permukiman, Bantuan Stimultan Rumah Swadaya (BSPS) dan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten. Pencapaian yang baik pada indikator persentase Kawasan kumuh tentu aja didukung oleh kinerja program kegiatan yang juga sama baiknya dan memperoleh predikat “Sangat Tinggi” di beberapa indikator. Pencapaian ini merupakan gambaran bahwa aspek perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan DPKP sudah cukup optimal dan efisien meskipun dengan anggaran yang terbatas. Berikut beberapa dokumentasi dalam rangka pengentasan kawasan kumuh.

Gambar 3.1 Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman Kelurahan Pancalaksana



Gambar 3.2 Pembangunan jalan lingkungan permukiman Kelurahan Paburan



Berikut capaian output kegiatan yang mempengaruhi pada nilai persentase Kawasan kumuh:

Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	13,200	12,662	95,923	SANGAT TINGGI
				PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	41,250	42,950	104,121	SANGAT TINGGI
				PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	70,500	29,936	42,462	SANGAT RENDAH
			PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH	Dokumen	1,000	1,000	100,000	SANGAT TINGGI
			PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH	%	100,000	100,000	100,000	SANGAT TINGGI
					PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH	%	100,000	-	-

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa factor kuat yang dimiliki DPKP adalah pada sisi penyediaan jalan lingkungan permukiman, hal ini ditunjukkan dengan persentase capaian yang lebih dari 100 %. Terbukti dengan sebanyak 30 pekerjaan Pembangunan jalan, dan 53 pekerjaan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim selama Tahun 2023 pada sektor permukiman kumuh. Di lain sisi juga, pada aspek rehabilitasi RTLH, Tahun 2023 Kota Serang memperoleh bantuan stimultan rumah swadaya sebanyak 622 unit sehingga mampu mendongkrak capaian kinerja penanganan RTLH, meski anggaran Dinas Perkim untuk kegiatan rehabilitasi RTLH mengalami rasionalisasi belanja pada periode Perubahan APBD Tahun 2023. Sedangkan pada drainase hanya 10 pekerjaan selama Tahun 2023 yang membuat capaian kinerja pada indicator Panjang drainase lingkungan kondisi baik belum mencapai apa yang sudah ditargetkan. Hal ini karena kurangnya dukungan anggaran sehingga Dinas Perkim lebih berfokus kepada penyediaan/perbaikan jalan lingkungan mengingat selain vitalnya peran jalan bagi mobilitas warga, selain itu banyaknya usulan warga terkait penyediaan jalan dari Tahun ke Tahun.

### 3.1.2 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata

Indikator Kinerja Utama DPKP pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman adalah luasan Kawasan permukiman yang tertata. Luasan Kawasan permukiman yang tertata merupakan Luas area bangunan rumah yang tertata secara teratur menghadap jalan dengan kerangka jalan tertata secara bertingkat mulai dari jalan raya, penghubung hingga jalan lingkungan atau local. Indikator ini merupakan indikator yang terdampak dari persentase kawasan kumuh. Semakin meningkat luasan kawasan kumuh yang dipugar, semakin meningkat capaian indikator ini. Sehingga persentase luasan Kawasan permukiman yang tertata dapat diperoleh dari:

$$\frac{\text{Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100 \% = \frac{5795,49 \text{ Ha}}{5973,96 \text{ Ha}} \times 100 \% = 97,013 \%$$

Setidaknya akhir Tahun 2022, sebanyak 5.769,15 Ha dari 5.973,96 Ha atau 96,57 % merupakan luasan Kawasan permukiman yang tertata (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*). Hal ini menggambarkan bahwa di Kota Serang Sebagian besar Kawasan permukiman adalah sudah berada dalam kondisi yang tertata berdasarkan definisi yang sudah diterangkan sebelumnya (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*). Pada akhir Tahun 2023, sebanyak 5.795,49 Ha dari 5.973,96 Ha merupakan luasan permukiman tertata (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*). Sehingga capaian kinerja IKU DPKP ini meningkat menjadi 97,01 % dan memperoleh predikat kinerja pelayanan sangat tinggi seperti tergambar pada tabel 3.6 di bawah ini:



Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata			Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,450	97,013	97,55	SANGAT TINGGI

Berdasarkan tugas dan fungsinya, DPKP diharapkan menghasilkan salah satu *outcome* berupa luasan Kawasan permukiman yang tertata. Hal ini selaras dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pelayanan pembangunan maupun pemeliharaan PSU permukiman. Di akhir tahun 2022, Keputusan Walikota terbaru menerangkan bahwa luasan kawasan kumuh di Kota Serang meningkat, yang semula tersisa 150,53 Ha menjadi 271 Ha atau meningkat seluas 120,47 Ha, namun DPKP terus melayani dan melakukan pengentasan kawasan kumuh, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang justru meningkat meski peningkatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena apa yang sudah ditargetkan sebesar 99,45 % justru belum tercapai. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan kota dan jumlah penduduk yang kian meningkat. Selain itu, pada periode Perubahan APBD Tahun 2023 terdapat rasionalisasi anggaran sehingga berimbas kepada jumlah RTLH yang direhabilitasi, pembangunan dan pemeliharaan drainase permukiman yang hanya mencapai 29,936 % dari target sebesar 70,50 % sehingga luasan yang dipugar oleh DPKP hanya sebesar 26,34 Ha, dari apa yang sudah ditargetkan yakni sebesar 28,85 Ha. Berikut capaian persentase luasan Kawasan permukiman tertata dari Tahun ke Tahun:

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJM	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					Dibandingkan dengan target akhir RPJM
			N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,450	93,200	93,550	99,220	99,380	99,450	99,190	93,560	96,570	96,572	97,013	106,427	100,011	97,329	97,174	97,549	97,549

### 3.1.3 Rasio Rumah Layak Huni

Indikator kinerja utama selanjutnya dari DPKP ialah Rasio Rumah Layak Huni. Seperti yang diketahui bahwa program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penanganan Kawasan permukiman kumuh, penyediaan PSU perumahan, dan rehabilitasi RTLH. Formulasi rasio rumah layak huni adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah tinggal}} = \frac{147.412 \text{ unit}}{167.930 \text{ unit}} = 0,878$$

Hingga akhir Tahun 2023, terdapat 20.518 unit RTLH yang tersebar di enam Kecamatan di Kota Serang dengan tingkat kerusakan yang variative dari ringan hingga berat atau sekitar 12,22 % dari seluruh rumah di Kota Serang yang berada di angka 167.930 unit (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*). Jumlah tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh DPKP dan juga berkoordinasi dengan KOTAKU (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*). Selama Tahun 2023, kegiatan pemberian bantuan sosial bagi rehabilitasi RTLH tidak dilaksanakan karena mengalami *refocusing* atau rasionalisasi belanja. Selain itu pula, di tahun 2023 juga DPKP tidak memperoleh dana bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai informasi, sejak tahun 2020 hingga 2022 DPKP telah menyalurkan bantuan sosial bagi RTLH kepada 164 unit rumah. Namun tahun 2023 ini terdapat intervensi melalui program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 622 unit (*Sumber: Bidang Kawasan Permukiman*). Meskipun capaian tersebut masih terbilang minim apabila dibandingkan dengan seluruh RTLH yang ada di Kota Serang, tetapi sejak 2019 hingga 2023 sudah sebanyak 1.432 unit RTLH yang telah merasakan bantuan baik dari APBD, BSPS, maupun DAK.

Tabel 3.8 Rincian Penyaluran Bantuan Sosial bagi RTLH berdasarkan Sumber Dananya

Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Tahun						TOTAL
		2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Realisasi)	2022 (Realisasi)	2023 (Realisasi)	2024 (Realisasi)	
Pemberian Bantuan Sosial untuk RTLH	APBD			12	74	0	0	
	DAK		62	42	60	0	0	
	BSPS	129			399	622		
	Intervensi Provinsi				32			
<b>SUB TOTAL</b>		129	62	54	565	622	0	<b>1432</b>

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak lebih dari 1.000 unit rumah di Kota Serang merasakan manfaat dari bantuan sosial ini yang berujung kepada kondisi hunian yang layak yang mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Hal ini merupakan capaian program Kawasan permukiman, namun ketercapaian pada level sub kegiatan dan pada level IKU rasio rumah layak huni justru tercapai. Berikut capaian kinerja indikator rasio rumah layak huni:

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah Tinggal	Rasio	0,868	0,877	101,011	SANGAT TINGGI

Mengingat jumlah RTLH di wilayah Kota Serang yang kian tinggi, pada periode 2018 – 2023 ini DPKP tidak menetapkan target kinerja yang terlalu tinggi sehingga dapat terus direalisasikan dan dicapai dengan angka persentase ketercapaian yang tinggi. Berikut capaian kinerja DPKP dalam mewujudkan rumah layak huni:

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJM	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					Dibandingkan dengan target akhir RPJM
			N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,868	0,970	0,972	0,868	0,868	0,868	0,867	0,871	0,871	0,874	0,877	89,381	89,588	100,403	100,743	101,011	101,011

Pada tabel di atas, realisasi rasio rumah layak huni di Kota Serang melebihi dari apa yang sudah ditargetkan oleh DPKP. Dalam prosesnya DPKP melakukan intervensi layanan dalam bentuk pemberian bantuan guna rehabilitasi RTLH, rehabilitasi rumah korban bencana, dan pemberian bantuan social untuk pembangunan jamban individu. Pada Tahun 2023 ini, sebanyak 18 rumah korban bencana diberikan bantuan untuk proses rehabilitasi, dan 622 rumah tidak layak huni mendapat bantuan untuk rehabilitasi. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari adanya bantuan dana alokasi khusus (DAK), dan juga program BSPS. Capaian ini tentu akan semakin optimal apabila dukungan APBD untuk program kerja Dinas Perkim semakin baik, mengingat banyaknya PSU kawasan permukiman kumuh seperti jalan, drainase, dan RTLH masih menjadi 3 indikator kumuh yang diprioritaskan oleh Dinas Perkim untuk terus diintervensi.

### 3.1.4 Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah

Indikator kinerja utama dalam sector perumahan adalah cakupan perumahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Formulasi untuk menghitung capaian ini adalah sebagai Berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengembang yang sudah menyerahkan asetnya}}{\text{Jumlah pengembang yang ada di Kota Serang}} \times 100 \% = \frac{96}{223} \times 100 \% = 43,049 \%$$

Berikut capaian cakupan perumahan yang ditangani oleh pemerintah daerah Tahun 2023:

Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
<b>Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengembang yang Sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Seluruh Pengembang di Kota Serang	%	35,230	43,049	122,195	SANGAT TINGGI

Terdapat 96 dari 223 atau 43,049 % pengembang yang telah menyerahkan aset PSU nya (*Sumber: Bidang Perumahan*). Hal ini merupakan angka yang impresif mengingat target di Tahun 2023 ini hanya 35,23 %. Bidang Perumahan bekerja pada sector pemeliharaan dan peningkatan PSU perumahan, pemberian bantuan bagi korban bencana yang juga merupakan SPM di DPKP, selain itu bidang perumahan pun membawahi UPTD Rusunawa yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi sewa Rusunawa yang berlokasi di Kaujon.

Sejak Tahun 2019 DPKP terus melakukan sosialisasi kepada pengembang dan perangkat masyarakat terkait penyerahan aset PSU perumahan kepada pemerintah daerah. Karena Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya dapat melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaan Ketika aset PSU nya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hasilnya ada 10 perumahan yang menyerahkan aset PSU nya kepada Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Perkim selama tahun 2023. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan penyerahan PSU perumahan:

Gambar 3.3 Acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU Perumahan





Berikut capaian kinerja cakupan perumahan yang ditangani oleh pemerintah daerah dari Tahun ke Tahun:

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJM	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					Dibandingkan dengan target akhir RPJM
			N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	35,230	45,000	50,000	30,350	32,840	35,230	28,720	27,900	34,160	40,284	43,049	63,822	55,800	112,554	122,669	122,195	122,195

Terlihat pada tabel di atas bahwa semakin tinggi pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pengembang untuk menyerahkan aset PSU nya kepada Pemerintah Daerah melalui DPKP agar pemeliharaan dan pembangunan PSU sebagai sarana penunjang fungsi hunian dapat terus terjaga. Tahun 2023 ini proses penyerahan aset PSU ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, dari mulai sosialisasi, koordinasi, verifikasi lapangan, kemudian penandatanganan berita acara serah Terima. Berikut data perumahan yang sudah menyerahkan aset PSU nya:

Tabel 3.13 Data Perumahan yang Sudah Menyerahkan Aset PSU nya

NO.	NAMA PERUMAHAN	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI	
			KELURAHAN	KECAMATAN
1	Komp. Perumnas	1992	Serang	Serang
2	Bumi Agung Permai I	2007	Unyur	Serang
3	Taman Graha Asri Tahap I	2010	Serang	Serang

	Taman Graha Asri Tahap 2 & 3	2022		
4	Persada Banten Tahap 1	2011	Kepuren dan Teritih	Walantaka
	Persada Banten Tahap 2	2014		
	Persada Banten Tahap 3	2017		
5	Citra Gading	2012	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya
6	Taman Angsoka Permai	2013	Kasemen	Kasemen
7	Taman Banten Lestari Tahap 1	2013	Trondol dan Warung Jaud	Serang dan Kasemen
	Taman Banten Lestari Tahap 2	2019		
8	Taman Cimuncang Indah	2013	Cimuncang	Serang
9	Taman Mutiara Indah	2013	Kaligandu	Serang
10	Griya Lopang Indah	2013	Lopang	Serang
11	Taman Pipitan Indah	2013	Pipitan	Walantaka

12	Titan Arum	2014	Drangong	Taktakan
13	Graha Griya Wahana Walantaka	2015	Pipitan dan Pengampelan	Walantaka
14	Taman Banjar Agung Indah	2015	Banjar Agung	Cipocok Jaya
15	Mandala Citra Indah	2015	Lopang Cimuncang	Serang
16	Taman Puri Indah	2015	Serang	Serang
17	Bumi Mukti Indah	2015	Serang	Serang
18	Taman Lopang Indah	2015	Lopang	Serang
19	Puri Cipta Pipitan	2013	Pipitan	Walantaka
20	Permata Syafira Regency	2014	Sepang	Taktakan
21	Banten Indah Permai Tahap 1	2017	Unyur	Serang
	Banten Indah Permai Tahap 2	2019		
	Banten Indah Permai Tahap 3	2021		

	Banten Indah Permai	2022		
22	Bumi Agung Permai II	2017	Kaligandu	Serang
23	Grand Apple Residence	2017	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya
24	Permata Banjar Asri Tahap 1	2017	Banjarsari	Cipocok Jaya
	Permata Banjar Asri Tahap 2	2018		
25	Puri Delta Serang	2017	Kasemen	Kasemen
26	Banjar Sari Permai	2018	Banjar Agung	Cipocok Jaya
27	Bukit Permai	2018	Serang	Serang
28	Bumi Serang Baru	2018	Trondol	Serang
29	Kidemang Unyur	2018	Unyur	Serang
30	Rahayu Residence	2018	Kota Baru	Serang
31	RSS Kodam III Siliwangi (Komplek Korem)	2018	Curug	Curug

32	Komp. Taman Asri	2019	Taman Baru	Taktakan
33	Kiara Garden	2019	Ds. Kiara	Walantaka
34	Lebak Indah	2019	Kaligandu	Serang
35	Komp. Depag	2019	Cipare	Serang
36	Taman Ciruas Permai Tahap 1 & 2	2019	Pager Agung	Walantaka
37	Grand Sutera Serang	2019	Panancangan	Cipocok Jaya
38	Puri Kartika Banjarsari	2019	Banjarsari	Cipocok Jaya
39	Ciruas Land	2019	Pasuluhan	Walantaka
40	Komp. Untirta Permai	2019	Panancangan	Cipocok Jaya
41	Ciceri Permai	2019	Sumurpecung	Serang
42	Puri Anggrek	2019	Teritih	Walantaka
43	Serang City	2019	Drangong	Taktakan

44	Puspa Regency	2019	Serang	Serang
45	Griya Ciracas Indah	2019	Serang	Serang
46	Puri Delta Kiara Tahap 1	2019	Kiara	Walantaka
	Puri Delta Kiara Tahap 2	2021		
47	Sepang Elok	2019	Sepang	Taktakan
48	Rss Pemda	2019	Banjarsari	Cipocok Jaya
49	Wijaya Permai	2020	Drangong	Taktakan
50	Griya Gemilang Sakti	2020	Sumurpecung	Serang
51	Permata Serang	2020	Sumurpecung	Serang
52	Puri Delta Angsana	2020	Kasemen	Kasemen
53	Sukawana Asri	2020	Sukawana	Curug
54	P & K	2020	Panancangan	Cipocok Jaya

55	Puri Serang Hijau	2020	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya
56	Mayabon Village	2020	Banjarsari	Cipocok Jaya
		2022		
57	Highland Park	2021	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya
58	Harmony Residence	2021	Kasemen	Kasemen
59	Bukit Mas Residence	2021	Panancangan	Cipocok Jaya
	Bukit Mas Residence	2022		
60	Puri Kanaka Griya Asri	2021	Gelam	Cipocok Jaya
61	Taman Widya Asri Tahap 1 & 2	2021	Panggungjati	Taktakan
62	Taman Pesona Residence	2021	Lialang	Taktakan
63	Taman Pesona	2021	Taktakan	Taktakan
64	Puri Delta Extension	2021	Kiara	Walantaka

65	Griya Reang Indah	2021	Banjarsari	Cipocok Jaya
66	Grand Sukawana	2021	Sukawana	Curug
67	Puri Cempaka	2021	Panancangan	Cipocok Jaya
68	Griya Permata Asri	2021	Dalung	Cipocok Jaya
69	Queen Garden	2021	Panggung Jati	Taktakan
70	Gedong Kaloran	2022	Lontar Baru dan Serang	Serang
71	Taman Alam Lestari	2022	Lialang	Taktakan
72	Graha Dalung Residence	2022	Dalung	Cipocok Jaya
73	Pondok Walantaka	2022	Walantaka	Walantaka
74	Bumi Serang Damai	2022	Drangong	Taktakan
75	Pesona Sepang	2022	Gelam	Cipocok Jaya
76	Komplek Pemda dan ABRI	2022	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya



77	Bumi Sari Permai	2022	Kasemen	Kasemen
78	The Green Beringin Residence	2022	Serang	Serang
79	Komplek Ciceri Indah	2022	Sumurpecung	Serang
80	Taman Krisan	2022	Banjarsari	Cipocok Jaya
81	Bumi Sepang Indah	2022	Sepang	Taktakan
82	Bumi Lipatik Lestari	2022	Tegalsari	Walantaka
83	Karisma Gelam Asri	2022	Gelam	Cipocok Jaya
84	Pesona Kasemen	2022	Kasemen	Kasemen
85	Pondok Angsana Indah 1	2022	Kasemen	Kasemen
86	Pondok Angsana Indah 2	2022	Kasemen	Kasemen
87	Pondok Parumasan Indah	2023	Kasemen	Kasemen
88	Pondok Gelam Indah	2023	Kasemen	Kasemen

89	Sepang Mountain Residence	2023	Sepang	Taktakan
90	Palima Indah Residence	2023	Kemanisan	Curug
91	Green Serang Madani Cilaku	2023	Cilaku	Curug
92	Green Serang Madani Prisma	2023	Penancangan	Cipocok Jaya
93	Komplek Pasir Indah	2023	Kaligandu	Serang
94	Pondok Kalodran Permai	2023	Kalodran	Walantaka
95	Harmony Residence 2	2023	Kasemen	Kasemen
96	Komplek Sumur Pecung Baru	2023	Sumurpecung	Serang

(Sumber: Bidang Perumahan)

### 3.1.5 Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah “Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan”. Indikator ini terdiri dari dua data pendukung yakni jumlah realisasi pelayanan pertanahan, dan jumlah target layanan pertanahan. Kedua data pendukung tersebut berbentuk dokumen. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai Berikut:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pelayanan pertanahan}}{\text{jumlah target layanan pertanahan}} \times 100 \% = \frac{4 \text{ layanan}}{4 \text{ layanan}} \times 100 \% = 100 \%$$

Mengingat bahwa bidang pertanahan adalah bidang yang baru terbentuk pada Tahun 2021, maka dari itu pada Tahun 2023, DPKP melalui bidang pertanahan menetapkan target layanan pertanahan sebanyak satu dokumen, dan terrealisasi sebanyak satu dokumen:

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan</b>	Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJM	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				Dibandingkan dengan target akhir RPJM	
			N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N	N+1	N+2	N+3		N+4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100,000	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	100			100,000	100,000	100,000	100,000
Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	99,900	-	-	66,600	83,300	99,900	-	-	100,000	100,000	99,9			150,150	120,048	100,000	100,000

### 3.1.6 Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

indikator kinerja utama yang kedua dari urusan pertanahan adalah capaian peningkatan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Capaian indikator ini tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pertanahan. Perhitungan capaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah}}{\text{Jumlah Target Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah}} \times 100\%$$

Bidang Pertanahan memiliki 4 program di Tahun 2023, yakni:

1. Program Penyelesaian Sengketa Garapan;
2. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
3. Program Penatagunaan Tanah;
4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Tahun 2023 ini DPKP menetapkan target peningkatan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebanyak 1 dokumen. Output dari indikator ini pun satu dokumen, maka capaiannya adalah sebagai Berikut:

Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Capaian Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Meski begitu, bidang pertanahan juga menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program kegiatannya. Beberapa kendala tersebut adalah Capaian jumlah dokumen rekomendasi izin membuka tanah.

kegiatan ini berada dalam program pengelolaan izin membuka tanah. Kegiatan ini mulanya bertujuan agar masyarakat yang dapat mengurus izin lokasi dan izin membuka tanah di Kota Serang. Proses sosialisasi kepada masyarakat melalui rapat-rapat koodinasi sudah dilaksanakan, namun kewenangan mengenai izin lokasi dan izin membuka tanah ini ternyata berada di bawah kewenangan DPMPTSP.

### 3.1.7 Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah

Dinas Perumahan terus berupaya untuk memperbaiki 4 indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Tahun ke Tahun. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan penilaian yang diberikan oleh Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berikut tangkapan layar dari laporan hasil evaluasi LKJIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dari Tahun 2020 hingga 2022.

Gambar 3.4 Tangkapan Layar Laporan Hasil Evaluasi LKJIP DPKP Tahun 2020

Hasil evaluasi yang diunggah dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Dinas Perumahan, Rajual dan Kawasan Permukiman (DPKRP) Kota Serang memperoleh nilai sebesar 62,87 (B = Baik).

Gambar 3.4 Tangkapan Layar Laporan Hasil Evaluasi LKJIP DPKP Tahun 2020

Hasil evaluasi yang diunggah dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang memperoleh nilai sebesar 67,52 (B = Baik).

Gambar 3.4 Tangkapan Layar Laporan Hasil Evaluasi LKJIP DPKP Tahun 2020

**Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang menunjukkan bahwa nilai sebesar 70,75 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik, namun masih perlu perbaikan selanjutnya tidak menunda.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dievaluasi	Bobot	Nilai
1.	Pelaksanaan Kinerja	80	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00
3.	Penyusunan Kinerja	15	13,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>180</b>	<b>70,75</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Capaian dengan predikat "Sangat Baik" ini tentunya tidak terlepas dari adanya harapan untuk terus meningkat, hal ini dibuktikan dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat selaku pihak yang menilai guna meningkatkan penilaian LKJIP DPKP dan diharapkan dapat meningkatkan penilaian SAKIP Kota Serang. Berikut rekomendasi yang disampaikan Inspektorat pada LHE LKJIP DPKP Tahun 2022:

No	Rekomendasi
1	Menyempurnakan dokumen rencana aksi kinerja pada dokumen Laporan Kinerja dengan melengkapi analisis atau upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat deviasi capaian kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semesteran)
2	Membuat kebijakan/Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi beserta rencana aksinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian dan efektivitas strategi yang diperlukan
4	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar menggunakan teknologi informasi (aplikasi) agar lebih efektif, efisien dan akurat

5	Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu
6	Pemanfaatan teknologi informasi kinerja dalam laporan kinerja agar memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan data realisasi capaian nasional
7	Menyempurnakan informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan didukung oleh data yang valid, sumber datanya jelas, dan dapat diverifikasi sesuai dengan rumusan perhitungannya
8	Pada dokumen laporan kinerja agar memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan data realisasi capaian nasional
9	Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja yaitu dengan menjelaskan analisis capaian kinerja berupa faktor keberhasilan atau kegagalan serta langkah dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam penyempurnaan kinerja serta menggunakan teknologi informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan menyajikan informasi terkait perubahan budaya kerja organisasi
10	Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB nomor 88 Tahun 2021
11	Menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya
12	Secara aktif melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment di internal perangkat daerah

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dari baiknya kinerja DPKP selama tiga tahun terakhir dalam mewujudkan Kawasan perumahan dan permukiman tertata tidak terlepas dari jumlah anggaran yang diserap dari tahun ke tahun. Selama Tahun 2023, DPKP menghabiskan anggaran sebesar Rp 51.714.307.397 dari Rp 53.029.816.534 atau 97,52 % yang terbagi menjadi tiga hal yakni:

1. Urusan perumahan dan permukiman: Rp 43.677.281.699
2. Urusan pertanahan: Rp 871.590.000
3. Urusan kesekretariatan: Rp 8.480.944.835

Rincian anggaran secara spesifik dapat dilihat pada tabel 3.18 di bawah. Secara umum, penyebab dari lemahnya penyerapan anggaran adalah sama seperti apa yang telah dipaparkan pada point-point sebelumnya. Kinerja yang kian membaik dari tahun ke tahun tidak sepenuhnya identic dengan jumlah anggaran yang diserap.

Tabel 3.18 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
			Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
				53.029.816.534	51.714.307.397	97,519	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			8.480.944.835	8.241.949.969	97,182	
		Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkung Perangkat Daerah					



			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.480.944.835</b>	<b>8.241.949.969</b>	<b>97,182</b>	
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.981.000	326.324.000	94,047	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.189.398.664	5.116.041.216	98,586	
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	41.188.800	40.800.000	99,056	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.500.000	166.735.000	99,543	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	713.330.596	706.553.442	99,050	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	327.118.000	322.795.000	98,678	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	876.263.600	867.616.217	99,013	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.164.175	695.085.094	84,853	
	<b>Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata</b>			<b>43.677.281.699</b>	<b>42.604.517.428</b>	<b>97,544</b>	
		<b>Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni</b>					
			<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.805.023.604</b>	<b>1.760.564.407</b>	<b>97,537</b>	
			Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	236.375.000	236.375.000	100,000	
			Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	88.375.000	83.725.000	94,738	

			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	1.480.273.604	1.440.464.407	97,311	
			<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>19.559.340.531</b>	<b>19.025.054.021</b>	<b>97,268</b>	
			Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	17.170.000	17.170.000	100,000	
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	19.542.170.531	19.007.884.021	97,266	
			<b>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>20.305.000</b>	<b>20.305.000</b>	<b>100,000</b>	
			Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	20.305.000	20.305.000	100,000	
			<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	<b>22.292.612.564</b>	<b>21.798.594.000</b>	<b>97,784</b>	
			Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	22.292.612.564	21.798.594.000	97,784	
	<b>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan</b>			<b>871.590.000</b>	<b>867.840.000</b>	<b>99,570</b>	
		<b>Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah</b>					
			<b>Program Penyelesaian Tanah Sengketa Garapan</b>	<b>59.085.000</b>	<b>59.085.000</b>	<b>100,000</b>	
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.085.000	59.085.000	100,000	
			<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>321.420.000</b>	<b>319.680.000</b>	<b>99,459</b>	
			Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong	321.420.000	319.680.000	99,459	
			<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>355.055.000</b>	<b>353.355.000</b>	<b>99,521</b>	

			Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	355.055.000	353.355.000	99,521	
			<b>Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>136.030.000</b>	<b>135.720.000</b>	<b>99,772</b>	
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	136.030.000	135.720.000	99,772	

Dan Berikut tingkat efisiensi penggunaan anggaran oleh DPKP selama Tahun 2023:

Tabel 3.19 Pencapaian Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Kinerja		Anggaran		Tingkat Efisiensi
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7*100	11	12=11/8*100	13
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan											
		Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkung Perangkat Daerah										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%	100,00	8.480.944.835	100	100,000	8.241.949.969	97,182	2,900
	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata											

		Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni										
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	72,92	1.805.023.604	54,167	74,282	1.760.564.407	97,537	2,525
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	40,00		44,350	110,876			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	13,20	19.559.340.531	12,662	95,923	19.025.054.021	97,268	2,808
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	41,25		42,950	104,121			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	70,50		29,936	42,462			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	12,00	20.305.000	12,201	101,675	20.305.000	100,000	0
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN	%	35,23	22.292.612.564	43,049	122,195	21.798.594.000	97,784	2,266

	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan											
		Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah										
			PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN	PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH	%	100,00	59.085.000	100,000	100,000	59.085.000	100,000	0,000
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	%	100,00	321.420.000	100,000	100,000	319.680.000	99,459	0,544
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA	%	100,00	355.055.000	100,000	100,000	353.355.000	99,521	0,481
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN	%	100,00	136.030.000	100,000	100,000	135.720.000	99,772	0,228

### 3.3 Penghargaan

Selama Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh penghargaan dari KPP Pratama Serang Barat atas kepatuhan pelaporan SPT Masa Terbaik Ketiga Kategori Instansi Pemerintah Tingkat Kota Serang selama Tahun Pajak 2023.

Gambar 3.1 Penghargaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022



Gambar 3.2 Piagam Penghargaan



### 3.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2022

Pada tahun 2022 lalu, terdapat hal-hal yang direkomendasikan oleh Inspektorat terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja. Atas rekomendasi tersebut, DPKP terus melakukan improvisasi demi memberikan pelayanan kepada public secara lebih baik. Pada tabel 4.1 di bawah diterangkan rincian rekomendasi Inspektorat dan tindak lanjutnya.

Tabel 4.1 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Menyempurnakan dokumen rencana aksi kinerja pada dokumen Laporan Kinerja dengan melengkapi analisis atau upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat deviasi capaian kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semesteran)	Dokumen rencana aksi yang disusun sudah sesuai form, untuk analisis akan disampaikan pada laporan pengukuran kinerja triwulanan tahun 2023, dan akan ditambahkan pada laporan kinerja tahun 2023.
2	Membuat kebijakan/Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SOP pengumpulan data kinerja sedang dalam proses penyusunan
3	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi beserta rencana aksinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian dan efektivitas strategi yang diperlukan	akan melampirkan laporan pengukuran kinerja triwulanan pada laporan kinerja tahun 2023. dan triwulan 1 dan 2 2023 ini sudah berjalan.
4	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar menggunakan teknologi informasi (aplikasi) agar lebih efektif, efisien dan akurat	sudah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIMAK (screen shoot)
5	Menerapkan kebijakan reward and punishment dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu	SK Kepala OPD sedang dalam proses penyusunan
6	Pemanfaatan teknologi informasi kinerja dalam laporan kinerja agar memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan data realisasi capaian nasional	sudah dilakukan penginputan data pembangunan di setiap semester pada aplikasi SIPD
7	Menyempurnakan informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan didukung oleh data yang valid, sumber datanya jelas, dan dapat diverifikasi sesuai dengan rumusan perhitungannya	pada laporan kinerja tahun 2023 akan dilampirkan sumber datanya
8	Pada dokumen laporan kinerja agar memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan data realisasi capaian nasional	pada laporan kinerja tahun 2023 akan dilampirkan sumber datanya



9	Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja yaitu dengan menjelaskan analisis capaian kinerja berupa faktor keberhasilan atau kegagalan serta langkah dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam penyempurnaan kinerja serta menggunakan teknologi informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan menyajikan informasi terkait perubahan budaya kerja organisasi	Pada laporan kinerja tahun 2023 akan dilengkapi dengan analisis faktor keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja tahun berjalan, serta melampirkan data-data pendukung yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi.
10	Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB nomor 88 Tahun 2021	pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja tidak pada skala OPD, namun pedoman ini disusun pada skala tingkat kota yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota
11	Menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya	DPKP sudah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya yakni mengunggah dokumen renstra, PK, IKU, renja, menyusun dokumen pengukuran kinerja triwulanan dengan didukung sistem informasi SIMAK
12	Secara aktif melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment di internal perangkat daerah	SK Kepala OPD sedang dalam proses penyusunan

## BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi Pemerintah Kota Serang secara keseluruhan untuk melaksanakan amanat Peraturan Walikota Serang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Selain dari keberhasilan secara keseluruhan di atas dalam Tahun 2023 juga terdapat belum optimalnya capaian kinerja, atau masih di bawah dari target yang ditetapkan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang belum telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2023 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Serang, dan seluruh pihak-pihak terkait (*stakeholders*) lainnya dalam merumuskan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Pemerintah Kota Serang;
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Optimalisasi waktu pelaksanaan seluruh kegiatan yang berpatokan kepada rencana aksi, baik dari sisi pemilihan waktu pelaksanaannya ataupun durasi pelaksanaannya.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

**R. Soedjat Sudirman Kawasari Highway Park Kota Serang Baru (RSM)  
Serang - Banten**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA SERANG  
NOMOR: 300.141-R/5.1/ TAHUN 2023**

**PERKIMAN PELAKSANAAN PEMERIDAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG,**

**Meningkat**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan disiplin serta mendorong upaya yang seluas-luasnya bagi kerja, dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
- b. Bahwa pemberian penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan keaktifan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketepatan, kerja sama, prakarsa, dan disiplin yang ditunjukkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2023.

**Mengingat**

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi Banten;
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
- p. Peraturan Walikota Serang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

## MENUTUSKAN

### Menetapkan

#### KESATU

1. Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang tahun 2023 meliputi:

1. Bentuk penghargaan, kriteria pemberituan dan sanksi;
2. Penetapan kriteria penilaian;
3. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Penetapan penerima penghargaan dan sanksi.

#### KEDUA

1. Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Momen KESATU adalah penghargaan diberikan dalam bentuk piagam disertai bentuk penghargaan lainnya diserahkan dengan ketentuan sebagai pola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I;

#### KETIGA

1. Penetapan kriteria penilaian:
  1. Penilaian kuantitatif dan Kualitatif
    - a. Penilaian terhadap pencapaian program sesuai rencana kerja;
    - b. Penilaian terhadap kapasitas terhadap program yang diberikan program;
  2. Penilaian Kualitatif
    - a. Kinerja terhadap ketentuan pelayanan dan standar (Monev);
    - b. Evaluasi keabsahan (laporan print dan gambar monev);
    - c. Evaluasi keabsahan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara selama pelaksanaan;
    - d. Tidak adanya pelanggaran keabsahan disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### KEMPAT

1. Pelaksanaan pemberian penghargaan:
  1. Penilaian penghargaan diserahkan dalam bentuk piagam penghargaan;
  2. Pemberian penghargaan dilaksanakan awal dalam setiap tahun;
  3. Pemberian penghargaan berlaku untuk masa jabatan:
    - a. Bulan Januari sampai bulan Desember;
    - b. Pemberian penghargaan dalam setiap bulannya dan diberikan pada bulan berikutnya;
    - c. Pemberian penghargaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

#### KELIMA

1. Sanksi sesuai:  
Penerapan sanksi diberikan dalam bentuk hukuman disiplin, yang meliputi:
  1. Teguran Lisan;
  2. Teguran Tertulis;
  3. Penempatan tidak pada posisi semula.Dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- KEDINAM** : Percepatan pemrosesan pengajuan dan tindak lanjut Ekspansi Kapasitas Unit Perumahan dan Kawasan Perkotaan Kota Serang.
- KETULU** : Keseluruhan permasalahan Tim Penilai akan ditanggapi dengan suatu keputusan sendiri.
- KEDALAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akan ditanggunkannya Ekspansi ini dibebankan pada anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Perkotaan Kota Serang.
- KESIMPULAN** : Ekspansi ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditandatangani di Serang  
 Pada tanggal: 1 Januari 2023  

 DEWA PEREMBAHAN  
 KEMENTERIAN PERKOTAAN KOTA SERANG  
 DEWA PEREMBAHAN, ST. SEM. 001  
 NO. 1001121 20004 (00)

LAMPIRAN II


SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

 <b>PEMERINTAH KOTA SERANG</b>	<b>Nama</b>	045/01/014/P/2023
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	07 Januari 2023
<b>DIKAS PERUMAHAN DAN BAWAHAN PERUMAHAN</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Ditetapkan</b>	21 Januari 2023
<b>SUB BAGIAN REJENCANA, PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>Di buat oleh</b>	Robert Lina Perumahan dan Kawasan Permukiman
	<b>Nama SOP</b>	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Serang nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman, Standar Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang</li> <li>- Peraturan Walikota Serang nomor 01 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tugas dan fungsi sub bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>- Memiliki pengetahuan dalam hal administrasi</li> </ul>	



<b>Keterkaitan dengan SOP lain</b>	<b>Peralatan / Perangkat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>- SOP Penyusunan Rencana Kerja (Rencja)</li> <li>- SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)</li> <li>- SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)</li> <li>- SOP Penyusunan Dokumen Indikasi Kinerja Utama (IKU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pelaporan / Dokumentasi</b>
<p>Agenda kegiatan ini di jelaskan/berikan dokumentasi, maka pengumpulan data kinerja tahun dapat dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen data kinerja diberikan kepada beberapa ringkasan untuk disimpan di sub bagian PEP, dan diberikan di masing-masing bidang/LPT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dicatat dan di rekam</li> <li>- Penindaklanjutan</li> </ul>

Urutan Proses	Pelayanan					Mula Mula			Est.
	Pelaksanaan	Kelemb. Pk	Kesulitan	Reaksi	Reputasi UPD	Ketersediaan	Waktu	Output	
1. Kepala UPD menerima surat masuk tentang permohonan (PM)							Surat masuk Lembar Stempel	10 hari	Surat ditandai
2. Sekretaris UPD menerima laporan dari unit							Surat masuk Lembar Stempel	5 hari	Surat ditandai
3. Kepala pengendalian lalu lintas menerima permohonan UPD							Surat masuk Lembar Stempel	4 jam	Surat ditanda
4. Sekretaris menerima UPD sesuai dengan format dan sesuai yang berlaku							Surat Masuk Kelemb. Pk Formulir Formulir UPD Formulir UPD	3 hari	UPD tidak ditandai
5. Petugas pengendalian LTR melakukan data dan waktu dan waktu							Surat masuk Lembar Stempel Surat UPD	3 hari	Surat UPD UPD ditandai
6. Dokumen UPD yang tidak sesuai ditinjau							Surat Dokumen UPD UPD di Tim Dokumen UPD	2 hari	Surat UPD ditandai
7. Kepala UPD menyerahkan dokumen UPD								4 jam	Surat UPD ditanda

Analisis: <b>Memperoleh</b> Dokumen, mengidentifikasi dokumen dan membuat surat pengantar kepada dokumen LPPD ke bagian Perencanaan							Dokumen LPPD Foto pengantar Surat pengantar	2 Hal	Dokumen LPPD Struktur	
---	---	--	--	--	--	--	--	-------	-----------------------------	--

**KEMENTERIAN PERENCANAAN  
 DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN PERKOTAAN  
 REPUBLIK INDONESIA**  
**KELOMPOK 11**  
**REP. INDONESIA 2009**

LAMPIRAN III

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I

NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Target		Triwulan I													
										JANUARI		FEBRUARI		MARET		KINERJA		ANGGARAN		KINERJA		ANGGARAN	
										Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	Poin	Hasil penilaian evaluasi RB DPKP	60,00															
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUNG PERANGKAT DAERAH			CAPAIAN HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH	Poin	Hasil penilaian evaluasi LKJIP DPKP	60,00	8.480.944.835			440.609.779	5,20			1.151.195.491	13,57			1.627.383.653	19,19		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%		100,00	8.480.944.835	5,00	5,00	440.609.779		20,00	20,00	1.151.195.491	13,57	25,00	25,00	1.627.383.653	19,19		
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PERENCANAAN, DAN EVALUASI YANG TERSEDIA / TARGET DOKUMEN * 100 %	100,00	346.981.000	1,00	1,00	2.000.000	0,58	1,00	1,00	2.000.000	0,58	6,00	6,00	10.000.000	2,88		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	117.593.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,00	32.560.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,00	40.887.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1,00	23.797.750	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1,00	25.054.500	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	107.088.750	0,00	0,00	2.000.000	1,87	0,00	0,00	2.000.000	1,87	-	0,00	10.000.000	9,34		

					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
				<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	<b>13,00</b>	<b>5.189.398.664</b>	<b>1,00</b>	<b>7,69</b>	<b>365.277.370</b>	<b>7,04</b>	<b>2,00</b>	<b>15,38</b>	<b>924.796.993</b>	<b>17,82</b>	<b>3,00</b>	<b>23,08</b>	<b>1.309.649.427</b>	<b>25,24</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518,00	4.956.287.695	37,00	7,14	357.527.370	7,21	74,00	14,29	909.296.993	18,35	111,00	21,43	1.272.361.427	25,67
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	157.650.969		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	14.038.000	8,90
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12,00	75.460.000	1,00	8,33	7.750.000	10,27	2,00	16,67	15.500.000	20,54	4,00	33,33	23.250.000	30,81
				<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	<b>1,00</b>	<b>41.188.800</b>		<b>0,00</b>	<b>3.400.000</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>24,76</b>
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	41.188.800		0,00	3.400.000	8,25	0,00	0,00	6.800.000	16,51	0,00	0,00	10.200.000	24,76
				<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / TARGET PENUNJANG * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>167.500.000</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	167.500.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD</b>	<b>%</b>	<b>KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI / TARGET KETERSEDIAAN * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>713.330.596</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>28.666.258</b>	<b>4,02</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>41.466.258</b>	<b>5,81</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	19.863.907	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5.159.985	25,98	0,00	0,00	5.159.985	25,98
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	177.526.073	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	18.428.616	0,00	0,00	-	0,00	2,00	16,67	5.694.123	30,90	4,00	33,33	5.694.123	30,90
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	82.681.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	12.800.000	15,48
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	55.000.000	0,00	0,00	-	0,00	2,00	16,67	14.982.150	27,24	4,00	33,33	14.982.150	27,24
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00	110.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	30.000.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	219.831.000	0,00	0,00	-	0,00	2,00	16,67	2.830.000	1,29	4,00	33,33	2.830.000	1,29



					CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %	35,23														
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	Jumlah Satuan Rumah Susun yang di Huni / Daya Tampung RUSUNAWA * 100%	72,92	1.805.023.604		0,00	42.700.000	0,00	0,00	0,00	89.287.500	4,95	0,00	0,00	173.387.500	9,61	
				PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	Jumlah Rumah yang direhab (Bencana) + Jumlah Rumah yang direhab (Relokasi) / Jumlah Keseluruhan Rumah yang Terkena Bencana dan Relokasi * 100%	40,00	0,00		0,00												
			PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA		PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah rumah yang terkena bencana alam * 100 %	30,00	236.375.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah Rumah yang terkena Relokasi * 100%	50,00	0,00		0,00	0,00		0,00									
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18,00	236.375.000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		-	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
				PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN HASIL PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN	%		100,00	88.375.000		0,00		0,00	100,00	100,00	46.587.500	52,72	100,00	100,00	46.587.500	52,72	
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1,00	88.375.000	0,00	0,00		0,00	1,00	100,00	46.587.500	52,72	1,00	100,00	46.587.500	52,72	
			PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS		PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	Jumlah Peserta yang mengikuti Binaan / Jumlah Target Peserta yang mengikuti Binaan * 100%	100,00	1.480.273.604		0,00	42.700.000	2,88	0,00	0,00	42.700.000	2,88	0,00	0,00	126.800.000	8,57	
				PRESENTASE TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	Jumlah Rusunawa yang sudah di Huni / Jumlah Rusunawa yang tersedia di Kabupaten/Kota * 100%	100,00	6,00		6,00	12,00			12,00								
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,00	788.026.779	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		96,00	692.246.825	6,00	6,25	42.700.000	6,17	6,00	6,25	42.700.000	6,17	18,00	18,75	126.800.000
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	Jumlah Rumah yang Tidak Layak Huni di kawasan Kumuh / Jumlah Seluruh Rumah di Kawasan Kumuh * 100%	13,20	19.559.340.531		0,00	0,00	53.300.000	0,27	0,00	0,00	2.011.375.300	10,28	0,00	0,00	2.595.540.300	13,27
				PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	41,25	0,00		0,00	0,00	0,00										
				PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	70,50	0,00		0,00	0,00	0,00										

				<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH</b>	Dokumen	Dokumen Baseline Kumuh merupakan Database Kawasan Kumuh yang terdapat di Kabupaten/Kota setempat yang sudah disepakati dan dibuatkannya SK Walikota/Kepala Daerah setempat.	1,00	17.170.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8.745.000	50,93	0,00	0,00	8.745.000	50,93
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	17.170.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8.745.000	50,93	0,00	0,00	8.745.000	50,93
				<b>PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH</b>	%	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh / Jumlah Target Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh * 100%</b>	100,00	19.542.170.531	0,00	0,00	53.300.000	0,27	2.002.630.300	10,25	0,00	0,00	2.586.795.300	13,24		
					<b>PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH</b>	%	<b>Jumlah RTLH yang Terbangun / Jumlah RTLH yang ada di Kabupaten/Kota * 100%</b>	100,00												0,00	0,00
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	18,00	1.501.536.150	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5.670.000	0,38	0,00	0,00	5.670.000	0,38
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	16.535.000	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	#DIV/0!	3.030.000	18,32	0,00	#DIV/0!	3.030.000	18,32
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	28,85	17.685.194.381	0,00	0,00	53.300.000	0,30	0,00	0,00	1.993.930.300	11,27	0,00	0,00	2.578.095.300	14,58
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1,00	338.905.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH</b>	%	<b>JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH / JUMLAH SELURUH RUMAH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100%</b>	12,00	20.305.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				<b>PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PSU DILUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN</b>	%		100,00	20.305.000	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
					<b>PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH</b>	%	<b>JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI / JUMLAH SELURUH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100</b>	100,00													
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	20.305.000	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN</b>	%	<b>JUMLAH PENGEMBANG YANG SUDAH MENYERAHKAN / JUMLAH PENGEMBANGAN YANG ADA DI KOTA SERANG *100%</b>	35,23	22.292.612.564	0,00	0,00	72.700.000	0,33	0,00	0,00	5.902.736.700	26,48	0,00	0,00	6.053.586.700	27,16
				<b>URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN</b>	<b>PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN</b>	%	<b>JUMLAH LOKASI YANG TERBANGUN / JUMLAH TARGET LOKASI YANG TERBANGUN * 100%</b>	100,00	22.292.612.564	1,00	1,00	72.700.000	0,33	27,00	27,00	5.902.736.700	26,48	28,00	28,00	6.053.586.700	27,16



				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	48,00	2.373.470.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1,00	64.570.000	0,00	0,00	-	0,00	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	20,00	125.051.000	0,00	0,00	-	0,00	2,00	10,00	14.620.000	11,69	3,00	15,00	14.620.000	11,69
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	25,00	19.729.521.564	1,00	4,00	72.700.000	0,37	7,00	28,00	5.826.146.700	29,53	8,00	32,00	5.976.996.700	30,29
	<b>MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN</b>				<b>CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH REALISASI PELAYANAN PERTANAHAN / JUMLAH TARGET LAYANAN PERTANAHAN * 100%</b>	<b>100,00</b>													
		<b>TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH</b>			<b>CAPAIAN PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH REALISASI PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH / JUMLAH PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH * 100%</b>	<b>99,90</b>	<b>871.590.000</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0,11</b>			<b>46.485.000</b>	<b>5,33</b>			<b>47.485.000</b>	<b>5,45</b>
			<b>PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN</b>		<b>PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH / JUMLAH DOKUMEN LAPORAN SENGKETA, KONFLIK, PERKARA PERTANAHAN * 100%</b>	<b>100,00</b>	<b>59.085.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.000</b>	<b>32,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.000</b>	<b>32,26</b>
				<b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH LAPORAN SENGKETA, KONFLIK &amp; PERKARA YANG TERFASILITASI</b>	<b>Dokumen</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN DATA SENGKETA, KONFLIK &amp; PERKARA YANG TERFASILITASI</b>	<b>1,00</b>	<b>59.085.000</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.000</b>	<b>32,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.000</b>	<b>32,26</b>
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	59.085.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	19.060.000	32,26	0,00	0,00	19.060.000	32,26
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>		<b>PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH KECAMATAN YANG AKAN DI INVENTARISASI / JUMLAH KECAMATAN KOTA SERANG * 100%</b>	<b>100,00</b>	<b>321.420.000</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,93</b>
				<b>INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>Dokumen</b>	<b>DOKUMEN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG</b>	<b>1,00</b>	<b>321.420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,93</b>
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	2,00	321.420.000	0,00	0,00	1.000.000	0,31	0,00	0,00	2.000.000	0,62	0,00	0,00	3.000.000	0,93
			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH REALISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH / JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH * 100%</b>	<b>100,00</b>	<b>355.055.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985.000</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985.000</b>	<b>3,09</b>
				<b>PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>CAPAIAN DOKUMENTASI PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Dokumen</b>	<b>JUMLAH LAPORAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1,00</b>	<b>355.055.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985.000</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985.000</b>	<b>3,09</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1,00	355.055.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	10.985.000	3,09

			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN	%	JUMLAH REALISASI PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN / JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH * 100%	100,00	136.030.000		0,00	-	0,00	0,00	0,00	14.440.000	10,62	0,00	0,00	14.440.000	10,62	
				PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	3,00	136.030.000		0,00	-	0,00	0,00	0,00	14.440.000	10,62	0,00	0,00	14.440.000	10,62	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1,00	19.170.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1,00	116.860.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	14.440.000	12,36	0,00	0,00	14.440.000	12,36	

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II

NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Target		Triwulan 2											
										APRIL				MEI				JUNI			
										Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran	
Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	Poin	Hasil penilaian evaluasi RB DPKP	60,00	8.480.944.835			2.294.900.931	27,06			3.122.472.606	36,82			4.254.982.044	50,17
		MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUNG PERANGKAT DAERAH			CAPAIAN HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH	Poin	Hasil penilaian evaluasi LKJIP DPKP	60,00													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		INDEKS KEPUJUAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%		100,00	8.480.944.835	35,00	35,00	2.294.900.931	27,06	55,00	55,00	3.122.472.606	36,82	50,00	50,00	4.254.982.044	50,17
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PERENCANAAN, DAN EVALUASI YANG TERSEDIA / TARGET DOKUMEN * 100 %	100,00	346.981.000	11,00	11,00	34.450.000	9,93	25,00	25,00	78.970.000	22,76	40,00	40,00	132.650.000	38,23
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	117.593.000	1,00	20	24.450.000	20,79	1,00	20	30.175.000	25,66	2,00	40	79.855.000	67,91
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,00	32.560.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	6.130.000	18,83	0,00	0,00	6.130.000	18,83
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,00	40.887.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	6.355.000	15,54	0,00	0,00	6.355.000	15,54
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1,00	23.797.750	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	5.770.000	24,25	0,00	0,00	5.770.000	24,25
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1,00	25.054.500	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	6.135.000	24,49	0,00	0,00	6.135.000	24,49
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	107.088.750	0,00	0,00	10.000.000	9,34	1,00	20,00	24.405.000	22,79	1,00	20,00	28.405.000	26,52
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!

				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD	Dokumen	JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD	13,00	5.189.398.664	5,00	38,46	1.938.186.705	37,35	6,00	46,15	2.342.713.234	45,14	7,00	53,85	2.981.700.400	57,46
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518,00	4.956.287.695	185,00	35,71	1.893.178.705	38,20	222,00	42,86	2.259.759.234	45,59	296,00	57,14	2.876.223.400	58,03
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	157.650.969	0,00	0,00	21.758.000	13,80	0,00	0,00	44.204.000	28,04	0,00	0,00	57.767.000	36,64
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12,00	75.460.000	4,00	33,33	23.250.000	30,81	6,00	50,00	38.750.000	51,35	7,00	58,33	47.710.000	63,23
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD	1,00	41.188.800	0,00	0,00	10.200.000	24,76	0,00	0,00	17.000.000	41,27	0,00	0,00	20.400.000	49,53
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	41.188.800	0,00	0,00	10.200.000	24,76	0,00	0,00	17.000.000	41,27	0,00	0,00	20.400.000	49,53
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD	%	JUMLAH KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / TARGET PENUNJANG * 100 %	100,00	167.500.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00	167.500.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD	%	KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI / TARGET KETERSEDIAAN * 100 %	100,00	713.330.596	27,00	27,00	55.996.258	7,85	40,00	40,00	140.188.385	19,65	50,00	50,00	194.898.385	27,32
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	19.863.907	0,00	0,00	5.159.985	25,98	0,00	0,00	5.159.985	25,98	0,00	0,00	5.159.985	25,98
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	177.526.073	0,00	0,00	-	0,00	2,00	16,67	38.257.519	21,55	2,00	16,67	38.257.519	21,55
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	18.428.616	4,00	33,33	5.694.123	30,90	4,00	33,33	5.694.123	30,90	4,00	33,33	5.694.123	30,90
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	82.681.000	0,00	0,00	12.800.000	15,48	0,00	0,00	12.800.000	15,48	0,00	0,00	12.800.000	15,48
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	55.000.000	4,00	33,33	14.982.150	27,24	5,00	41,67	19.946.758	36,27	5,00	41,67	19.946.758	36,27
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00	110.000.000	0,00	0,00	-	0,00	1,00	8,33	13.200.000	12,00	3,00	25,00	38.700.000	35,18
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	30.000.000	2,00	16,67	5.000.000	16,67	3,00	25,00	7.500.000	25,00	3,00	25,00	7.500.000	25,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	219.831.000	5,00	41,67	12.360.000	5,62	6,00	50,00	37.630.000	17,12	7,00	58,33	66.840.000	30,41
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	JUMLAH KETERSEDIAAN BMD / TARGET KETERSEDIAAN BMD * 100 %	100,00	327.118.000	0,00	0,00	-	0,00	10,00	10,00	46.040.000	14,07	50,00	50,00	261.505.000	79,94



					CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	Jumlah Satuan Rumah Susun yang di Huni / Daya Tampung RUSUNAWA * 100%	72,92		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
					PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	Jumlah Rumah yang direhab (Bencana) + Jumlah Rumah yang direhab (Relokasi) / Jumlah Keseluruhan Rumah yang Terkena Bencana dan Relokasi * 100%	40,00	1.805.023.604	0,00	0,00	207.853.200	11,52	0,00	0,00	425.064.200	23,55	55,56	138,89	730.235.822	40,46
				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah rumah yang terkena bencana alam * 100 %	30,00		0,00	0,00			0,00	0,00			55,56	185,19		
					PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah Rumah yang terkena Relokasi * 100%	50,00	236.375.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	138.875.000	58,75
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18,00	236.375.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10,00	55,56	138.875.000	58,75
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
				PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN HASIL PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN	%		100,00	88.375.000	100,00	100,00	46.587.500	52,72	100,00	100,00	46.587.500	52,72	100,00	100,00	60.625.000	68,60
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1,00	88.375.000	1,00	100,00	46.587.500	52,72	1,00	100,00	46.587.500	52,72	1,00	100,00	60.625.000	68,60
				PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	Jumlah Peserta yang mengikuti Binaan / Jumlah Target Peserta yang mengikuti Binaan * 100%	100,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
					PRESENTASE TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	Jumlah Rusunawa yang sudah di Huni / Jumlah Rusunawa yang tersedia di Kabupaten/Kota * 100%	100,00	1.480.273.604	28,00	28,00	161.265.700	10,89	40,00	40,00	378.476.700	25,57	50,00	50,00	530.735.822	35,85
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,00	788.026.779	0,00	0,00	34.465.700	4,37	0,00	0,00	92.765.700	11,77	0,00	0,00	132.069.822	16,76
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	96,00	692.246.825	18,00	18,75	126.800.000	18,32	40,00	41,67	285.711.000	41,27	56,00	58,33	398.666.000	57,59
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	Jumlah Rumah yang Tidak Layak Huni di kawasan Kumuh / Jumlah Seluruh Rumah di Kawasan Kumuh * 100%	13,20		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
					PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	41,25	19.559.340.531	0,00	0,00	3.800.445.700	19,43	0,00	0,00	4.909.036.050	25,10	0,00	0,00	7.118.929.300	36,40
					PRESENTASE PANJANG DRAINASE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	70,50		0,00	0,00			0,00	0,00			40,73	57,77		

				<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH</b>	Dokumen	Dokumen Baseline Kumuh merupakan Database Kawasan Kumuh yang terdapat di Kabupaten/Kota setempat yang sudah disepakati dan dibuatkannya SK Walikota/Kepala Daerah setempat.	1,00	17.170.000	0,00	0,00	8.745.000	50,93	0,00	0,00	8.745.000	50,93	0,00	0,00	10.245.000	59,67
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	1	17.170.000	0,00	0,00	8.745.000	50,93	0,00	0,00	8.745.000	50,93	0,00	0,00	10.245.000	59,67
				<b>PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH</b>	%	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh / Jumlah Target Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh * 100%	100,00	19.542.170.531	15,00	15,00	3.791.700.700	19,40	25,00	25,00	4.900.291.050	25,08	50,00	50,00	7.108.684.300	36,38
					<b>PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH</b>	%	Jumlah RTLH yang Terbangun / Jumlah RTLH yang ada di Kabupaten/Kota * 100%	100,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	18,00	1.501.536.150	0,00	0,00	5.670.000	0,38	0,00	0,00	5.670.000	0,38	9,00	50,00	816.040.000	54,35
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	16.535.000	0,00	#DIV/0!	3.030.000	18,32	0,00	#DIV/0!	3.030.000	18,32	0,00	#DIV/0!	11.930.000	72,15
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Perumahan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	28,85	17.685.194.381	0,00	0,00	3.783.000.700	21,39	0,00	0,00	4.891.591.050	27,66	0,00	0,00	6.276.089.300	35,49
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1,00	338.905.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	4.625.000	1,36
			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>		<b>PERSentase RTLH di Luar Kawasan Kumuh</b>	%	<b>JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH / JUMLAH SELURUH RUMAH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100%</b>	12,00	20.305.000	0,00	#N/A	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00
				<b>PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSentase PSU diluar Kawasan Kumuh yang Terbangun</b>	%		100,00	20.305.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00
					<b>PERSentase Penanganan RTLH diluar Kawasan Kumuh</b>	%	<b>JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI / JUMLAH SELURUH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100</b>	100,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	20.305.000	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	#DIV/0!	20.305.000	100,00
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		<b>PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN</b>	%	<b>JUMLAH PENGEMBANG YANG SUDAH MENYERAHKAN / JUMLAH PENGEMBANGAN YANG ADA DI KOTA SERANG *100%</b>	35,23	22.292.612.564	0,00	0,00	8.350.449.800	37,46	0,00	0,00	9.311.978.000	41,77	0,00	0,00	9.975.747.000	44,75

				URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN	%	JUMLAH LOKASI YANG TERBANGUN / JUMLAH TARGET LOKASI YANG TERBANGUN * 100%	100,00	22.292.612.564	28,00	28,00	8.350.449.800	37,46	28,00	28,00	9.311.978.000	41,77	41,00	41,00	9.975.747.000	44,75
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	48,00	2.373.470.000	4,00	8,33	191.350.000	8,06	9,00	18,75	430.385.000	18,13	15,00	31,25	734.660.000	30,95
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1,00	64.570.000	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	20,00	125.051.000	3,00	15,00	14.620.000	11,69	3,00	15,00	14.620.000	11,69	3,00	15,00	14.620.000	11,69
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	25,00	19.729.521.564	10,00	40,00	8.082.509.800	40,97	11,00	44,00	8.805.003.000	44,63	12,00	48,00	9.164.497.000	46,45
	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN				CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	JUMLAH REALISASI PELAYANAN PERTANAHAN / JUMLAH TARGET LAYANAN PERTANAHAN * 100%	100,00													
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH			CAPAIAN PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	%	JUMLAH REALISASI PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH / JUMLAH PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH * 100%	99,90	871.590.000			47.485.000	5,45			168.455.000	19,33			327.365.000	37,56
			PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENKETA GARAPAN		PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENKETA TANAH	%	JUMLAH FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENKETA TANAH / JUMLAH DOKUMEN LAPORAN SENKETA, KONFLIK, PERKARA PERTANAHAN * 100%	100,00	59.085.000	0,00	0,00	19.060.000	32,26	0,00	0,00	19.060.000	32,26	100,00	100,00	39.325.000	66,56
				PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN SENKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN DATA SENKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	1,00	59.085.000	0,00	0,00	19.060.000	32,26	0,00	0,00	19.060.000	32,26	1,00	100,00	39.325.000	66,56
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	59.085.000	0,00	0,00	19.060.000	32,26	0,00	0,00	19.060.000	32,26	1,00	100,00	39.325.000	66,56
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	%	JUMLAH KEKAMATAN YANG AKAN DI INVENTARISASI / JUMLAH KEKAMATAN KOTA SERANG * 100%	100,00	321.420.000	0,00	0,00	3.000.000	0,93	0,00	0,00	104.800.000	32,61	50,00	50,00	236.560.000	73,60
				INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	DOKUMEN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	1,00	321.420.000	0,00	0,00	3.000.000	0,93	0,00	0,00	104.800.000	32,61	1,00	100,00	236.560.000	73,60
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	2,00	321.420.000	0,00	0,00	3.000.000	0,93	0,00	0,00	104.800.000	32,61	1,00	50,00	236.560.000	73,60
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		PRESENTASE PENINGKATAN PENGUNAAN TANAH NEGARA	%	JUMLAH REALISASI PERENCANAAN PENGUNAAN TANAH / JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGUNAAN TANAH * 100%	100,00	355.055.000	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	17.870.000	5,03



				PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,00	355.055.000	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	17.870.000	5,03	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1,00	355.055.000	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	10.985.000	3,09	0,00	0,00	17.870.000	5,03	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN	%	JUMLAH REALISASI PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN / JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH * 100%	100,00	136.030.000	0,00	0,00	14.440.000	10,62		0,00	33.610.000	24,71	0,00	0,00	33.610.000	24,71	
				PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	3,00	136.030.000	0,00	0,00	14.440.000	10,62		0,00	33.610.000	24,71	1,00	33,33	33.610.000	24,71	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1,00	19.170.000	0,00	0,00	-	0,00	1,00	100,00	19.170.000	100,00	1,00	100,00	19.170.000	100,00	
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1,00	116.860.000	0,00	0,00	14.440.000	12,36	0,00	0,00	14.440.000	12,36	0,00	0,00	14.440.000	12,36	

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III

NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Target		Triwulan 3												
										JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
										Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran		
Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10													
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	Poin	Hasil penilaian evaluasi RB DPKP	60,00	8.480.944.835	60,00	100,00	4.916.835.702	57,98			5.579.213.055	65,79			6.050.037.336	71,34	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUNG PERANGKAT DAERAH			CAPAIAN HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH	Poin	Hasil penilaian evaluasi LKJIP DPKP	60,00		60,00	100,00											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%		100,00	8.480.944.835	58,00	58,00	4.916.835.702	57,98	63,00	63,00	5.579.213.055	65,79	68,00	68,00	6.050.037.336	71,34	
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PERENCANAAN, DAN EVALUASI YANG TERSEDIA / TARGET DOKUMEN * 100 %	100,00	346.981.000	50,00	50,00	160.710.000	46,32	58,00	58,00	181.120.000	52,20	65,00	65,00	200.110.000	57,67	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	117.593.000	3,00	60	86.645.000	73,68	3,00	60	92.505.000	78,67	3,00	60	95.405.000	81,13	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	32.560.000	0,00	0,00	10.725.000	32,94	0,00	0,00	10.725.000	32,94	0,00	0,00	14.035.000	43,11	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	40.887.000	0,00	0,00	13.545.000	33,13	0,00	0,00	17.405.000	42,57	0,00	0,00	20.155.000	49,29	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	23.797.750	0,00	0,00	5.770.000	24,25	0,00	0,00	5.770.000	24,25	0,00	0,00	8.820.000	37,06	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	25.054.500	0,00	0,00	6.135.000	24,49	0,00	0,00	9.510.000	37,96	0,00	0,00	12.360.000	49,33	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00	107.088.750	2,00	40,00	37.890.000	35,38	3,00	60,00	45.205.000	42,21	3,00	60,00	49.335.000	46,07	

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
				<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	<b>13,00</b>	<b>5.189.398.664</b>	<b>8,00</b>	<b>61,54</b>	<b>3.371.414.253</b>	<b>64,97</b>	<b>9,00</b>	<b>69,23</b>	<b>3.750.188.369</b>	<b>72,27</b>	<b>10,00</b>	<b>76,92</b>	<b>4.109.670.227</b>	<b>79,19</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518,00	4.956.287.695	333,00	64,29	3.241.539.253	65,40	370,00	71,43	3.601.135.369	72,66	407,00	78,57	3.960.617.227	79,91
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	157.650.969	0,00	0,00	74.415.000	47,20	0,00	0,00	89.593.000	56,83	0,00	0,00	89.593.000	56,83
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12,00	75.460.000	8,00	66,67	55.460.000	73,50	9,00	75,00	59.460.000	78,80	9,00	75,00	59.460.000	78,80
				<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	<b>1,00</b>	<b>41.188.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800.000</b>	<b>57,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200.000</b>	<b>66,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200.000</b>	<b>66,04</b>
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	41.188.800	0,00	0,00	23.800.000	57,78	0,00	0,00	27.200.000	66,04	0,00	0,00	27.200.000	66,04
				<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / TARGET PENUNJANG * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>167.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00	167.500.000	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD</b>	<b>%</b>	<b>KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI / TARGET KETERSEDIAAN * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>713.330.596</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>313.036.413</b>	<b>43,88</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>430.788.151</b>	<b>60,39</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>442.399.133</b>	<b>62,02</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	19.863.907	0,00	0,00	10.699.422	53,86	0,00	0,00	16.267.039	81,89	0,00	0,00	16.267.039	81,89
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	177.526.073	5,00	41,67	76.649.013	43,18	8,00	66,67	114.705.613	64,61	8,00	66,67	114.705.613	64,61
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	18.428.616	7,00	58,33	11.118.742	60,33	10,00	83,33	15.784.970	85,65	10,00	83,33	15.784.970	85,65
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	82.681.000	3,00	25,00	31.700.000	38,34	6,00	50,00	47.450.000	57,39	7,00	58,33	51.230.000	61,96
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	55.000.000	7,00	58,33	29.669.278	53,94	9,00	75,00	38.679.218	70,33	10,00	83,33	44.948.200	81,72
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00	110.000.000	5,00	41,67	42.700.000	38,82	8,00	66,67	50.700.000	46,09	9,00	75,00	49.762.000	45,24
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	30.000.000	5,00	41,67	12.500.000	41,67	8,00	66,67	20.000.000	66,67	9,00	75,00	22.500.000	75,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	219.831.000	8,00	66,67	97.999.958	44,58	9,00	75,00	127.201.311	57,86	9,00	75,00	127.201.311	57,86



					CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %	35,23		43,05	122,20											
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	Jumlah Satuan Rumah Susun yang di Huni / Daya Tampung RUSUNAWA * 100%	72,92		0,00	0,00		59,38	81,42			59,38	81,42				
					PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	Jumlah Rumah yang direhab (Bencana) + Jumlah Rumah yang direhab (Relokasi) / Jumlah Keseluruhan Rumah yang Terkena Bencana dan Relokasi * 100%	40,00	1.805.023.604	55,56	138,89		42,82	138,89	772.935.822	42,82	891.706.611	49,40	100,00	250,00	1.005.171.651	55,69
				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah rumah yang terkena bencana alam * 100 %	30,00		55,56	185,19		55,56	185,19			142.375.000	60,23	100,00	333,33	236.375.000	100,00
					PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah Rumah yang terkena Relokasi * 100%	50,00	236.375.000	0,00	0,00		0,00	0,00	138.875.000	58,75	142.375.000	60,23	0,00	0,00	236.375.000	100,00
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18,00	236.375.000	10,00	55,56	138.875.000	58,75	10,00	55,56	142.375.000	60,23	18,00	100,00	236.375.000	100,00	
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
				PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN HASIL PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN	%		100,00	88.375.000	100,00	100,00	60.625.000	68,60	100,00	100,00	69.525.000	78,67	100,00	100,00	73.975.000	83,71	
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1,00	88.375.000	1,00	100,00	60.625.000	68,60	1,00	100,00	69.525.000	78,67	1,00	100,00	73.975.000	83,71	
				PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	Jumlah Peserta yang mengikuti Binaan / Jumlah Target Peserta yang mengikuti Binaan * 100%	100,00	1.480.273.604	0,00	0,00		0,00	0,00	573.435.822	38,74	679.806.611	45,92	0,00	0,00	694.821.651	46,94
					PRESENTASE TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	Jumlah Rusunawa yang sudah di Huni / Jumlah Rusunawa yang tersedia di Kabupaten/Kota * 100%	100,00		56,00	56,00		69,00	69,00					75,00	75,00		
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,00	788.026.779	0,00	0,00	132.069.822	16,76	0,00	0,00	174.163.201	22,10	0,00	0,00	189.178.241	24,01	
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	96,00	692.246.825	62,00	64,58	441.366.000	63,76	71,00	73,96	505.643.410	73,04	71,00	73,96	505.643.410	73,04	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	Jumlah Rumah yang Tidak Layak Huni di kawasan Kumuh / Jumlah Seluruh Rumah di Kawasan Kumuh * 100%	13,20	19.559.340.531	0,00	0,00		0,00	0,00	8.181.821.500	41,83	11.383.702.300	58,20	0,00	0,00	11.842.600.550	60,55
					PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	41,25		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		

					PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	70,50			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
					PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH	Dokumen	Dokumen Baseline Kumuh merupakan Database Kawasan Kumuh yang terdapat di Kabupaten/Kota setempat yang sudah disepakati dan dibuatkannya SK Walikota/Kepala Daerah setempat.	1,00	17.170.000	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	17.170.000	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00	
				PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH	%	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh / Jumlah Target Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh * 100%	100,00	19.542.170.531	57,00	57,00	8.164.651.500	41,78	72,00	72,00	11.366.532.300	58,16	75,00	75,00	11.825.430.550	60,51	
					PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH	%	Jumlah RTLH yang Terbangun / Jumlah RTLH yang ada di Kabupaten/Kota * 100%	100,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	18,00	1.501.536.150	11,00	61,11	1.004.233.000	66,88	12,00	66,67	1.094.111.000	72,87	16,00	88,89	1.363.812.000	90,83	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	16.535.000	0,00	#DIV/0!	16.535.000	100,00	0,00	#DIV/0!	16.535.000	100,00	0,00	#DIV/0!	16.535.000	100,00	
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	28,85	17.685.194.381	0,00	0,00	7.137.478.500	40,36	0,00	0,00	10.249.481.300	57,96	0,00	0,00	10.438.678.550	59,02	
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1,00	338.905.000	0,00	0,00	6.405.000	1,89	0,00	0,00	6.405.000	1,89	0,00	0,00	6.405.000	1,89	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH / JUMLAH SELURUH RUMAH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100%	12,00	20.305.000	0,00	0,00	20.305.000	100,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00	
				PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PSU DILUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN	%		100,00	20.305.000	0,00	0,00	20.305.000	100,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00	
					PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH	%	JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI / JUMLAH SELURUH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100	100,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	20.305.000	0,00	#DIV/0!	20.305.000	100,00	0,00	#DIV/0!	20.305.000	100,00	0,00	#DIV/0!	20.305.000	100,00	

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN	%	JUMLAH PENGEMBANG YANG SUDAH MENYERAHKAN / JUMLAH PENGEMBANGAN YANG ADA DI KOTA SERANG *100%	35,23	22.292.612.564	0,00	0,00	12.212.521.50 0	54,78	0,00	0,00	13.852.295.60 0	62,14	0,00	0,00	14.170.194.60 0	63,56
				URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN	%	JUMLAH LOKASI YANG TERBANGUN / JUMLAH TARGET LOKASI YANG TERBANGUN * 100%	100,00	22.292.612.564	61,00	61,00	12.212.521.50 0	54,78	61,00	61,00	13.852.295.60 0	62,14	61,00	61,00	14.170.194.60 0	63,56
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	48,00	2.373.470.000	47,00	97,92	2.358.751.000	99,38	48,00	100,00	2.371.226.000	99,91	48,00	100,00	2.371.226.000	99,91
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1,00	64.570.000	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	20,00	125.051.000	18,00	90,00	112.630.000	90,07	20,00	100,00	123.051.000	98,40	20,00	100,00	123.051.000	98,40
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	25,00	19.729.521.564	13,00	52,00	9.679.170.500	49,06	14,00	56,00	11.296.048.60 0	57,25	15,00	60,00	11.613.947.60 0	58,87
	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN				CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	JUMLAH REALISASI PELAYANAN PERTANAHAN / JUMLAH TARGET LAYANAN PERTANAHAN * 100%	100,00		50,00	50,00										
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH			CAPAIAN PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	%	JUMLAH REALISASI PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH / JUMLAH PENINGKATAN PENGUSAHAAN, PENGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH * 100%	99,90	871.590.000	50,00	50,05	341.260.000	39,15			745.460.000	85,53			745.460.000	85,53
			PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN		PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENKETA TANAH	%	JUMLAH FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH / JUMLAH DOKUMEN LAPORAN SENKETA, KONFLIK, PERKARA PERTANAHAN * 100%	100,00	59.085.000	100,00	100,00	45.235.000	76,56	100,00	100,00	45.235.000	76,56	100,00	100,00	45.235.000	76,56
				PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN SENGKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN DATA SENGKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	1,00	59.085.000	1,00	100,00	45.235.000	76,56	1,00	100,00	45.235.000	76,56	1,00	100,00	45.235.000	76,56
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	59.085.000	1,00	100,00	45.235.000	76,56	1,00	100,00	45.235.000	76,56	1,00	100,00	45.235.000	76,56
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	%	JUMLAH KECAMATAN YANG AKAN DI INVENTARISASI / JUMLAH KECAMATAN KOTA SERANG * 100%	100,00	321.420.000	50,00	50,00	237.560.000	73,91	100,00	100,00	313.260.000	97,46	100,00	100,00	313.260.000	97,46
				INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	DOKUMEN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	1,00	321.420.000	1,00	100,00	237.560.000	73,91	1,00	100,00	313.260.000	97,46	1,00	100,00	313.260.000	97,46
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	2,00	321.420.000	1,00	50,00	237.560.000	73,91	2,00	100,00	313.260.000	97,46	2,00	100,00	313.260.000	97,46
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		PRESENTASE PENINGKATAN PENGUNAAN TANAH NEGARA	%	JUMLAH REALISASI PERENCANAAN PENGUNAAN TANAH / JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN	100,00	355.055.000	0,00	0,00	24.855.000	7,00	100,00	100,00	353.355.000	99,52	100,00	100,00	353.355.000	99,52

							PENGUNAAN TANAH * 100%																
				PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,00	355.055.000	0,00	0,00	24.855.000	7,00	1,00	100,00	353.355.000	99,52	1,00	100,00	353.355.000	99,52		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1,00	355.055.000	0,00	0,00	24.855.000	7,00	1,00	100,00	353.355.000	99,52	1,00	100,00	353.355.000	99,52		
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN	%	JUMLAH REALISASI PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAATKAN / JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH * 100%	100,00	136.030.000	0,00	0,00	33.610.000	24,71	0,00	0,00	33.610.000	24,71	0,00	0,00	33.610.000	24,71		
				PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	3,00	136.030.000	1,00	33,33	33.610.000	24,71	1,00	33,33	33.610.000	24,71	1,00	33,33	33.610.000	24,71		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1,00	19.170.000	1,00	100,00	19.170.000	100,00	1,00	100,00	19.170.000	100,00	1,00	100,00	19.170.000	100,00		
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1,00	116.860.000	0,00	0,00	14.440.000	12,36	0,00	0,00	14.440.000	12,36	0,00	0,00	14.440.000	12,36		



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV

NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Target		Triwulan 4											
										OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
										Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran	
Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10												
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	Poin	Hasil penilaian evaluasi RB DPKP	60,00	8.480.944.835									60,00	100,00	8.241.949.969	97,18
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUNG PERANGKAT DAERAH			CAPAIAN HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH	Poin	Hasil penilaian evaluasi LKJIP DPKP	60,00		6.806.232.927,00	80,25	7.580.602.927,00	89,38	60,00	100,00						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%		100,00	8.480.944.835	79,00	79,00	6.806.232.927	80,25	85,00	85,00	7.580.602.927	89,38	100,00	100,00	8.241.949.969	97,18
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PERENCANAAN, DAN EVALUASI YANG TERSEDIA / TARGET DOKUMEN * 100 %	100,00	346.981.000	79,00	79,00	243.610.000	70,21	85,00	85,00	273.375.250	78,79	100,00	100,00	326.324.000	94,05
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	117.593.000	3,00	60	100.025.000	85,06	4,00	80	105.818.000	89,99	5,00	100	114.218.000	97,13
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	32.560.000	0,00	0,00	20.410.000	62,68	0,00	-	25.715.000	78,98	1,00	100,00	32.260.000	99,08
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	40.887.000	0,00	0,00	28.690.000	70,17	0,00	-	32.265.000	78,91	1,00	100,00	40.675.000	99,48
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	23.797.750	0,00	0,00	14.805.000	62,21	0,00	-	18.277.750	76,80	1,00	100,00	23.747.750	99,79
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	25.054.500	1,00	100,00	19.465.000	77,69	1,00	100,00	23.239.500	92,76	1,00	100,00	24.974.500	99,68
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5,00	107.088.750	4,00	80,00	60.215.000	56,23	4,00	80,00	68.060.000	63,55	5,00	100,00	90.448.750	84,46

					Iktisar Realisasi Kinerja SKPD																	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
					<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	Dokumen	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD</b>	13,00	5.189.398.664	11,00	84,62	4.504.082.985	86,79	12,00	92,31	4.890.691.658	94,24	13,00	100,00	5.116.041.216	98,59
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518,00	4.956.287.695	444,00	85,71	4.321.351.985	87,19	481,00	92,86	4.677.059.658	94,37	518,00	100,00	4.883.200.216	98,53
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	157.650.969	0,00	0,00	115.271.000	73,12	0,00	-	142.172.000	90,18	1,00	100,00	157.381.000	99,83
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12,00	75.460.000	10,00	83,33	67.460.000	89,40	11,00	91,67	71.460.000	94,70	12,00	100,00	75.460.000	100,00
					<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	Dokumen	<b>JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD</b>	1,00	41.188.800	1,00	100,00	34.000.000	82,55	1,00	100,00	37.400.000	90,80	1,00	100,00	40.800.000	99,06
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	41.188.800	0,00	0,00	34.000.000	82,55	0,00	-	37.400.000	90,80	1,00	100,00	40.800.000	99,06
					<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD</b>	%	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / TARGET PENUNJANG * 100 %</b>	100,00	167.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	166.735.000	99,54
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,00	167.500.000	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	166.735.000	99,54
					<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD</b>	%	<b>KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI / TARGET KETERSEDIAAN * 100 %</b>	100,00	713.330.596	85,00	85,00	556.535.497	78,02	95,00	95,00	658.968.306	92,38	100,00	100,00	706.553.442	99,05
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	19.863.907	1,00	100,00	19.863.903	100,00	1,00	100,00	19.863.903	100,00	1,00	100,00	19.863.903	100,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	177.526.073	9,00	75,00	136.435.096	76,85	10,00	83,33	152.181.488	85,72	12,00	100,00	177.190.624	99,81
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	18.428.616	12,00	100,00	18.428.616	100,00	12,00	100,00	18.428.616	100,00	12,00	100,00	18.428.616	100,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	82.681.000	9,00	75,00	61.436.000	74,30	11,00	91,67	72.272.000	87,41	12,00	100,00	81.533.000	98,61
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	55.000.000	11,00	91,67	49.113.170	89,30	12,00	100,00	54.993.140	99,99	12,00	100,00	54.993.140	99,99
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00	110.000.000	10,00	83,33	97.011.000	88,19	11,00	91,67	101.011.000	91,83	12,00	100,00	105.011.000	95,46

				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	30.000.000	10,00	83,33	25.000.000	83,33	11,00	91,67	27.500.000	91,67	12,00	100,00	30.000.000	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	219.831.000	10,00	83,33	149.247.712	67,89	11,00	91,67	212.718.159	96,76	12,00	100,00	219.533.159	99,86
				<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH KETERSEDIAAN BMD / TARGET KETERSEDIAAN BMD * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>327.118.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>322.795.000</b>	<b>98,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>322.795.000</b>	<b>98,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>322.795.000</b>	<b>98,68</b>
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1,00	41.960.000	1,00	100,00	41.960.000	100,00	1,00	100,00	41.960.000	100,00	1,00	100,00	41.960.000	100,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21,00	235.158.000	21,00	100,00	230.835.000	98,16	21,00	100,00	230.835.000	98,16	21,00	100,00	230.835.000	98,16
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	50.000.000	1,00	100,00	50.000.000	100,00	1,00	100,00	50.000.000	100,00	1,00	100,00	50.000.000	100,00
				<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / TARGET KETERSEDIAAN * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>876.263.600</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>712.004.245</b>	<b>81,25</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>794.291.413</b>	<b>90,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>867.616.217</b>	<b>99,01</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	8.000.000	12,00	100,00	8.000.000	100,00	12,00	100,00	8.000.000	100,00	12,00	100,00	8.000.000	100,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	438.000.000	11,00	91,67	346.134.245	79,03	12,00	100,00	390.321.413	89,11	12,00	100,00	433.046.217	98,87
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	430.263.600	10,00	83,33	357.870.000	83,17	11,00	91,67	395.970.000	92,03	12,00	100,00	426.570.000	99,14
				<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH BMD YANG TERPELIHARA / TARGET BMD YANG AKAN DIPELIHARA * 100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>819.164.175</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>433.205.200</b>	<b>52,88</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>603.081.300</b>	<b>73,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>695.085.094</b>	<b>84,85</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	217.858.000	3,00	60,00	133.951.000	61,49	3,00	60,00	148.951.000	68,37	5,00	100,00	187.341.589	85,99
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	332.455.000	14,00	70,00	218.289.600	65,66	16,00	80,00	242.955.700	73,08	20,00	100,00	278.068.905	83,64
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	72,00	21.000.000	61,00	84,72	17.000.000	80,95	72,00	100,00	21.000.000	100,00	72,00	100,00	21.000.000	100,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126,00	49.820.000	123,00	97,62	43.410.000	87,13	126,00	100,00	49.820.000	100,00	126,00	100,00	49.820.000	100,00
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	198.031.175	0,00	0,00	20.554.600	10,38	1,00	100,00	140.354.600	70,88	1,00	100,00	158.854.600	80,22
	<b>TERWUJUDNYA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERTATA</b>				<b>PERSENTASE KAWASAN KUMUH</b>	<b>%</b>	<b>Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten/Kota / Luas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota * 100%</b>	<b>1,07</b>	<b>43.677.281.699</b>			<b>33.362.832.107,00</b>	<b>76,38</b>			<b>37.928.819.934</b>	<b>86,84</b>	<b>0,92</b>	<b>114,27</b>	<b>42.604.517,428</b>	<b>97,54</b>

					PRESENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA	%	Jumlah Luasan Permukiman yang tertata / Jumlah Luas Permukiman * 100%	99,45										97,01	97,55				
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI			RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah seluruh Rumah Tinggal	0,87										0,88	101,13				
					CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %	35,23										43,05	122,20				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	Jumlah Satuan Rumah Susun yang di Huni / Daya Tampung RUSUNAWA * 100%	72,92		59,38	81,42		59,38	81,42			54,17	74,28					
						PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	Jumlah Rumah yang direhab (Bencana) + Jumlah Rumah yang direhab (Relokasi) / Jumlah Keseluruhan Rumah yang Terkena Bencana dan Relokasi * 100%	40,00	1.805.023.604	100,00	250,00	1.630.426.407	90,33	100,00	250,00	1.693.336.407	93,81	100,00	250,00	1.760.564.407	97,54	
				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah rumah yang terkena bencana alam * 100 %	30,00	236.375.000	100,00	333,33	236.375.000	100,00	100,00	333,33	236.375.000	100,00	100,00	333,33	236.375.000	100,00		
						PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	Jumlah Rumah yang direhab/Jumlah Rumah yang terkena Relokasi * 100%		50,00													
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18,00	236.375.000	18,00	100,00	236.375.000	100,00	18,00	100,00	236.375.000	100,00	18,00	100,00	236.375.000	100,00		
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	0,00	#DIV/0 !	-	#DIV/0 !	0,00	#DIV/0 !	-	#DIV/0 !	0,00	#DIV/0 !	-	#DIV/0 !		
				PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN HASIL PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN	%		100,00	88.375.000	100,00	100,00	73.975.000	83,71	100,00	100,00	83.725.000	94,74	100,00	100,00	83.725.000	94,74		
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1,00	88.375.000	1,00	100,00	73.975.000	83,71	1,00	100,00	83.725.000	94,74	1,00	100,00	83.725.000	94,74		
			PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS		PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	Jumlah Peserta yang mengikuti Binaan / Jumlah Target Peserta yang mengikuti Binaan * 100%	100,00	1.480.273.604	100,00	100,00	1.320.076.407	89,18	100,00	100,00	1.373.236.407	92,77	100,00	100,00	1.440.464.407	97,31		
						PRESENTASE TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	Jumlah Rusunawa yang sudah di Huni / Jumlah Rusunawa yang tersedia di Kabupaten/Kota * 100%		100,00			75,00	75,00			75,00	75,00				100,00	100,00
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,00	788.026.779	1,00	100,00	729.032.997	92,51	1,00	100,00	729.032.997	92,51	1,00	100,00	753.560.997	95,63		

				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	96,00	692.246.825	83,00	86,46	591.043.410	85,38	90,00	93,75	644.203.410	93,06	96,00	100,00	686.903.410	99,23
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	Jumlah Rumah yang Tidak Layak Huni di kawasan Kumuh / Jumlah Seluruh Rumah di Kawasan Kumuh * 100%	13,20	19.559.340.531	0,00	0,00	15.696.222.200	80,25	0,00	-	18.206.096.227	93,08	12,66	95,91	19.025.054.021	97,27
				PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	41,25	0,00		0,00	0,00			-	42,95			104,12			
				PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	Jumlah Panjang Drainase Lingkungan yang Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan *100%	70,50	0,00		0,00	0,00			-	29,94			42,46			
				PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH	Dokumen	Dokumen Baseline Kumuh merupakan Database Kawasan Kumuh yang terdapat di Kabupaten/Kota setempat yang sudah disepakati dan dibuatkannya SK Walikota/Kepala Daerah setempat.	1,00	17.170.000	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	17.170.000	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00	1,00	100,00	17.170.000	100,00
			PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA		PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH	%	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh / Jumlah Target Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Kumuh * 100%	100,00	19.542.170.531	87,00	87,00	15.679.052.200	80,23	97,00	97,00	18.188.926.227	93,08	100,00	100,00	19.007.884.021	97,27
				PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH	%	Jumlah RTLH yang Terbangun / Jumlah RTLH yang ada di Kabupaten/Kota * 100%	100,00	0,00		0,00	0,00			-	0,00			0,00			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	18,00	1.501.536.150	18,00	100,00	1.501.525.000	100,00	18,00	100,00	1.484.070.580	98,84	18,00	100,00	1.482.695.025	98,75
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	16.535.000	0,00	#DIV/0!	16.535.000	100,00	0,00	#DIV/0!	16.535.000	100,00	0,00	#DIV/0!	16.535.000	100,00
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	28,85	17.685.194.381	0,00	0,00	14.154.587.200	80,04	26,34	91,30	16.681.915.647	94,33	26,34	91,30	17.175.076.496	97,12
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1,00	338.905.000	0,00	0,00	6.405.000	1,89	0,00	-	6.405.000	1,89	1,00	100,00	333.577.500	98,43
					PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH / JUMLAH SELURUH RUMAH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100%	12,00	20.305.000	0,00	0,00	20.305.000	100,00	0,00	-	20.305.000	100,00	12,20	101,67	20.305.000	100,00
				PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PSU DI LUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN	%		100,00	20.305.000	0,00	0,00	20.305.000	100,00	0,00	-	20.305.000	100,00	0,00	0,00	20.305.000	100,00

				PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH	%	JUMLAH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH / JUMLAH SELURUH RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH * 100	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	20.305.000	0,00	#DIV/0 !	20.305.000	100,00	0,00	#DIV/0 !	20.305.000	100,00	0,00	#DIV/0 !	20.305.000	100,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN	%	JUMLAH PENGEMBANG YANG SUDAH MENYERAHKAN / JUMLAH PENGEMBANGAN YANG ADA DI KOTA SERANG *100%	35,23	22.292.612.564	0,00	0,00	16.015.878.500	71,84	43,05	122,20	18.009.082.300	80,78	43,05	122,20	21.798.594.000	97,78
				URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN	%	JUMLAH LOKASI YANG TERBANGUN / JUMLAH TARGET LOKASI YANG TERBANGUN * 100%	100,00	22.292.612.564	67,00	67,00	16.015.878.500	71,84	74,00	74,00	18.009.082.300	80,78	100,00	100,00	21.798.594.000	97,78
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	48,00	2.373.470.000	48,00	100,00	2.371.226.000	99,91	48,00	100,00	2.371.226.000	99,91	48,00	100,00	2.371.226.000	99,91
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1,00	64.570.000	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97	1,00	100,00	61.970.000	95,97
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	20,00	125.051.000	20,00	100,00	123.051.000	98,40	20,00	100,00	123.051.000	98,40	20,00	100,00	123.051.000	98,40
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	25,00	19.729.521.564	17,00	68,00	13.459.631.500	68,22	20,00	80,00	15.452.835.300	78,32	25,00	100,00	19.242.347.000	97,53
	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN				CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	JUMLAH REALISASI PELAYANAN PERTANAHAN / JUMLAH TARGET LAYANAN PERTANAHAN * 100%	100,00										100,00	100,00		
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAAN TANAH			CAPAIAN PENINGKATAN PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	%	JUMLAH REALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH / JUMLAH PENINGKATAN PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH * 100%	99,90	871.590.000			865.840.000	99,34			866.840.000	99,46			867.840.000	99,57
			PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN		PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH	%	JUMLAH FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH / JUMLAH DOKUMEN LAPORAN SENGKETA, KONFLIK, PERKARA PERTANAHAN * 100%	100,00	59.085.000	100,00	100,00	59.085.000	100,00	100,00	100,00	59.085.000	100,00	100,00	100,00	59.085.000	100,00
				PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN SENGKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN DATA SENGKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	1,00	59.085.000	1,00	100,00	59.085.000	100,00	1,00	100,00	59.085.000	100,00	1,00	100,00	59.085.000	100,00

				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	59.085.000	5,00	500,00	59.085.000	100,00	5,00	500,00	59.085.000	100,00	5,00	500,00	59.085.000	100,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	%	JUMLAH KECAMATAN YANG AKAN DI INVENTARISASI / JUMLAH KECAMATAN KOTA SERANG * 100%	100,00	321.420.000	100,00	100,00	317.680.000	98,84	100,00	100,00	318.680.000	99,15	100,00	100,00	319.680.000	99,46	
				INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	DOKUMEN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	1,00	321.420.000	1,00	100,00	317.680.000	98,84	1,00	100,00	318.680.000	99,15	1,00	100,00	319.680.000	99,46	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	2,00	321.420.000	2,00	100,00	317.680.000	98,84	2,00	100,00	318.680.000	99,15	2,00	100,00	319.680.000	99,46	
			PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH		PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGAR	%	JUMLAH REALISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH / JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH * 100%	100,00	355.055.000	100,00	200,00	353.355.000	99,52	100,00	100,00	353.355.000	99,52	100,00	100,00	353.355.000	99,52	
				PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,00	355.055.000	1,00	101,00	353.355.000	99,52	1,00	100,00	353.355.000	99,52	1,00	100,00	353.355.000	99,52	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1,00	355.055.000	1,00	100,00	353.355.000	99,52	1,00	100,00	353.355.000	99,52	1,00	100,00	353.355.000	99,52	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		PERSNTASE PENGELOLAAN TANAH NEGAR	%	JUMLAH REALISASI PENGELOLAAN TANAH NEGAR YANG DIMANFAATKAN / JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH * 100%	100,00	136.030.000	100,00	100,00	135.720.000	99,77	100,00	100,00	135.720.000	99,77	100,00	100,00	135.720.000	99,77	
				PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	3,00	136.030.000	3,00	100,00	135.720.000	99,77	3,00	100,00	135.720.000	99,77	3,00	100,00	135.720.000	99,77	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1,00	19.170.000	1,00	100,00	19.170.000	100,00	1,00	100,00	19.170.000	100,00	1,00	100,00	19.170.000	100,00	
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1,00	116.860.000	1,00	100,00	116.550.000	99,73	1,00	100,00	116.550.000	99,73	1,00	100,00	116.550.000	99,73	

LAMPIRAN IV

SCREEN SHOT APLIKASI SIMAK

The screenshot displays the SIMAK application interface. At the top, there is a blue header bar with the SIMAK logo and the text 'Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas'. Below the header, a navigation menu is visible on the left side, listing various modules such as 'Beranda', 'Profil', 'Rencana Kerja', 'Tugas', 'Penilaian Kinerja', 'Penilaian Organisasi', 'Penilaian Individu', 'Penilaian Tim', 'Penilaian Komunitas', 'Penilaian Sektor', 'Penilaian Desa', 'Penilaian Kecamatan', 'Penilaian Kabupaten', 'Penilaian Provinsi', and 'Penilaian Nasional'. The main content area is titled 'Realisasi Tujuan dan Sasaran DPD' and contains a table with the following data:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
1	100% tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan	100%	100%
2	100% tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan	100%	100%
3	100% tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan	100%	100%
4	100% tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan	100%	100%
5	100% tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan	100%	100%
6	100% tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan	100%	100%



LAMPIRAN V

BERKAS PEMOTONGAN TPP TAHUN 2023

DAFTAR PEMBAYARAN TP PNS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN / ESELON	NO. NPWP	NO. REKENING	PAGU TPP	BASIC TPP	BEBAN KERJA						KONDISI KERJA				JUMLAH BRUTO TPP	PPH 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN							
							BEBAN KERJA	PPH 21	JUMLAH BRUTO	POTONGAN ABSEN	POTONGAN KINERJA	JUMLAH BRUTO SETELAH POTONGAN ABSEN DAN KINERJA	KONDISI KERJA	TAMBAHAN SELISIH TUNJANGAN JABATAN	PPH 21	JUMLAH BRUTO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (13+15)	17 = (9+14)	19 = (16-17-18)	20							
5			25.201.136.6-401.000	0070807361101	4.250.000	9.525.551	4.250.000	637.500	4.887.500	-	680.000	4.207.500	-		-	-	4.207.500	637.500	3.570.000	5							
	Pembina / IV a																										
14			26.334.854.2-401.000	0006243142100	6.400.000	5.793.106	5.793.106	289.655	6.082.761	217.600	768.000	5.097.161	606.894		30.345	637.239	5.734.400	320.000	5.414.400	14							
	Penata Tk. I / III d	Eselon IV a																									
19			87.569.959.7401.000	0007501481100	2.300.000	5.107.759	2.300.000	115.000	2.415.000	87.400	276.000	2.051.600	-		-	-	2.051.600	115.000	1.936.600	19							
	Penata Muda Tk. I / III b																										
		<b>JUMLAH</b>			<b>176.750.000</b>	<b>219.022.215</b>	<b>170.096.443</b>	<b>13.879.902</b>	<b>183.976.345</b>	<b>549.750</b>	<b>1.724.000</b>	<b>181.702.595</b>	<b>6.653.557</b>	<b>355.000</b>	<b>430.348</b>	<b>7.438.905</b>	<b>189.141.500</b>	<b>14.310.250</b>	<b>174.831.250</b>								

